



MANAJEMEN KRISIS

Protokol Penyelamatan dan Pemulihan
di Sektor Pangan, Pertanian dan Perdesaan

Editor: Lala M. Kolopaking

Eriyatno
Kadarwan Soewardi
Kudang Boro Seminar
Lala M. Kolopaking
Purwiyatno Hariyadi
Rizaldi Boer
Ronny R. Noor

MANAJEMEN KRISIS

Protokol Penyelamatan dan Pemulihan
di Sektor Pangan, Pertanian dan Perdesaan

PENULIS UTAMA:

Eriyatno

Kadarwan Soewardi

Kudang Boro Seminar

Lala M. Kolopaking

Purwiyatno Hariyadi

Rizaldi Boer

Ronny R. Noor

EDITOR:

Lala M. Kolopaking

**MANAJEMEN KRISIS: Protokol Penyelamatan dan Pemulihan di Sektor Pangan,
Pertanian dan Perdesaan**

Penulis:

Agus Buono – Ardiansyah - Bramasto Nugroho - Dodik Briawan - Eko Hari Purnomo
Eriyatno - Fahim M Taqi - Fredian Tonny - Hari Wijayanto - Kadarwan Soewardi
Kudang Boro Seminar - Lala M. Kolopaking - Lisna Y. Poeloengan - Marimin
Mohammad Iqbal Banna - Nuri Andarwulan - Purwiyatno Hariyadi - Rizaldi Boer
Ronny R. Noor

Editor:

Lala M. Kolopaking

Layout:

Nunung Nurhayati dan Mohammad Iqbal Banna

Desain Buku dan Kulit Sampul:

Mohammad Iqbal Banna

Diterbitkan pertama kali, April 2010

Oleh

PT. Penerbit IPB Press

Kampus IPB Taman Kencana

Jl. Taman Kencana No. 3 Bogor 16151

Telp. 0251 - 8355 158, E-mail: ipbpress@ipb.ac.id

Hak Cipta dilindungi oleh undang undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh
Isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-979-493-246-5

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PRAKATA EDITOR

PROTOKOL KRISIS MANAJEMEN (*Eriyatno dan Lala M Kolopaking – PSP3 IPB*)1

INDIKASI KRISIS PARAMETER DAN FAKTOR PENGENDALINYA UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN PERDESAAN (*Eriyatno, Hari Wijayanto dan Agus Buono – PSP3 IPB*)53

SISTEM DETEKSI DINI UNTUK MANAJEMEN KRISIS PANGAN DENGAN SIMULASI MODEL DINAMIS DAN KOMPUTASI CERDAS (*Kudang Boro Seminar, Marimin dan Nuri Andarwulan – FATETA IPB*)131

PENGEMBANGAN PROTOKOL PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN KRISIS PANGAN DAN GIZI PADA KELOMPOK RAWAN (*Purwiyatno Hariyadi, Dodik Briawan, Fahim M. Taqi dan Eko Hari Purnomo – SEAFast CENTER IPB*)167

PENGEMBANGAN PROTOKOL PENGENDALIAN PENGANGGURAN AKIBAT KRISIS KEUANGAN GLOBAL UNTUK PENCEGAHAN PEMISKINAN (*Lala M. Kolopaking, Lisna Y. Poeloengan, Mohammad Iqbal Banna dan Fredian Tonny – PSP3 IPB*)201

ANALISIS POTENSI PERDAGANGAN KARBON KEHUTANAN SEBAGAI INOVASI INVESTASI DALAM RANGKA MENGATASI KRISIS KEUANGAN GLOBAL (*Rizaldi Boer, Bramasto Nugoroho, dan Ardiansyah – CCROM SEAP IPB*)253

PENGEMBANGAN SISTEM JARING PENGAMAN SEKTOR PERTANIAN DAN PEDESAAN UNTUK PENGENDALIAN DAMPAK KRISIS FINANSIAL GLOBAL (*Kadarwan Soewardi, Eriyatno, Lala M. Kolopaking dan Ronny R. Noor - PSP3 IPB*)289

Prakata Editor

Buku ini merupakan bunga rampai dari hasil-hasil penelitian oleh Working Group for Food, Agriculture and Rural Development di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2009. Working Group tersebut ditugaskan oleh Rektor IPB untuk meneliti Dampak Krisis Finansial Global 2008 terhadap sektor Pangan, Pertanian dan Perdesaan. Penelitian terpadu tersebut terdiri dari enam kelompok pakar yang masing-masing menelaah pada topik tersendiri dengan sektor riset yang berkesesuaian. Dana penelitian didapatkan utamanya dari biaya DIPA-IPB tentang Penelitian Strategis Unggulan dari Ditjen Dikti yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB.

Buku ini menyajikan hasil penelitian kebijakan dengan rekomendasi yang operasional dimana sumber-sumber data dan pengetahuan tidak saja hanya ditimba dari lingkungan IPB, bahkan juga telah mengakomodasi pemikiran lintas kampus melalui berbagai FGD dan Lokakarya serta diperkaya juga dengan kajian kasus internasional.

Adapun peneliti utama pada WG-CMP FARD terdiri dari Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, MRur. Sc, Dr. Ir. Pastowo, MEng, Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, MSc, Dr. Ir. Rizaldi Boer, MS, Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, MSc, Dr. Ir. Hari Wijayanto, MS, Prof. Dr. Ir. Eriyatno, MSAE, Prof. Dr. Ir. Kadarwan Soewardi, Prof. Dr. Ir. Marimin, MSc, Dr. Ir. Aceng Hidayat, Dr. Ir. Dwi Andreas Santoso, MS dan Dr. Ir. Eka Intan Kumala Putri, MSi. Tim WG CMP FARD dalam operasionalisasinya disupervisi oleh Prof. Dr. Yonny Koemaryono, Dr. Ir. Anas M. Fauzi dan Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya Noorachmat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kesemua nara sumber, para asisten peneliti dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga bermanfaat dalam membangun **resiliensi** negara dan **kohesi** bangsa untuk mempertahankan NKRI dari gejolak krisis finansial global yang mungkin terjadi sewaktu-waktu.

Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS

Ketua WG-CMP FARD

Strategi Penanggulangan Krisis Keuangan Global: Mengembangkan Sistem Ekonomi Domestik

Eriyatno dan Lala M. Kolopaking

Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa dalam mendirikan Negara Republik Indonesia, maka landasan filosofi kenegaraannya adalah Pancasila. Salah satu sila yang patut dikedepankan terkait dengan perekonomian nasional adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian dalam kondisi normal maupun situasi yang abnormal, atau krisis, misi kenegaraan tersebut harus terus diupayakan terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Bilamana terminologi "krisis" dikaitkan dengan fungsi manajemen dari suatu sistem kenegaraan maka persoalannya terletak pada bagaimana strategi penanggulangannya. Pada hakikatnya, tidak ada suatu lembaga atau negara yang menginginkan terjadinya krisis seperti pada Perang Dunia I dan II. Namun kejutan eksternalitas di bidang keuangan global telah mengkandaskan Negara Islandia di tahun 2009 dan membuat "chaos" Yunani di tahun 2010.

Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya setiap negara, terutama yang masih masuk ke dalam kategori negara berkembang, untuk menyusun strategi penanggulangan krisis ekonomi sebagai upaya "sedia payung sebelum hujan". Pada bab ini, disampaikan gagasan awal daripada strategi penanggulangan krisis ekonomi yang diperkirakan masih bisa terjadi di masa mendatang. Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan mempunyai karakter resiliensi yang khas, sehingga perlu dikaji kebijakan pemulihan dan pencegahan khususnya di sektor pangan, pertanian dan pedesaan.

Kondisi perekonomian nasional sekarang ini dapat dikaji sebagai dampak dari penerapan bertahun-tahun atas strategi pertumbuhan ekonomi *trickle down effect* yang selalu diterapkan dan dipercaya menjadi patokan untuk mengejar target kondisi terbaik dari perekonomian masyarakat, dan bahkan juga kesejahteraannya. Pembahasan atas indikator makro ekonomi seperti angka PDB seringkali dilakukan tanpa dikaitkan dengan persoalan ekonomi riil dan sosial yang

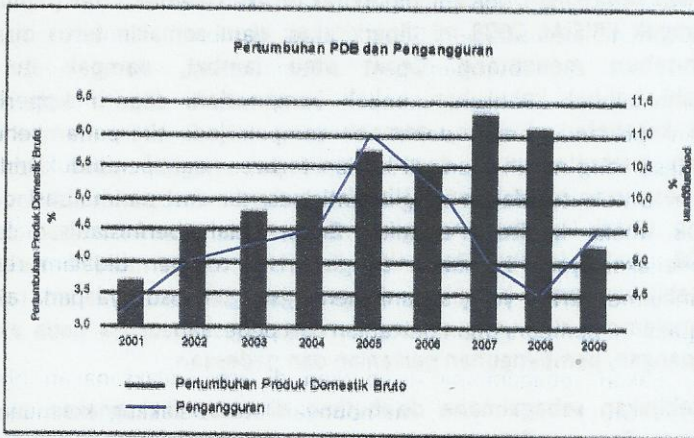
dihadapi masyarakat. Kondisi yang mana seringkali mengundang kritik pakar-pakar ilmu sosial atau bahkan dari lingkungan ahli-ahli ekonomi kelembagaan (Lunati, 2001; Mubyarto, 2000, Sri Edi Swasono, 2010).

Menurut Prasentyoko (2009), semua orang setuju bahwa krisis tetap akan terjadi, namun mekanisme dan pemicunya apa, hal itu sulit diprediksi. Dan lagi, bila pemicu krisis bisa dideteksi, boleh jadi krisis tidak akan pernah terjadi. Argumen yang mendukung resiko gelembung surat utang cukup beralasan, dimana defisit anggaran akan meningkatkan penerbitan obligasi negara (SUN). Jika gelembung surat utang pecah, dunia akan dilanda kepanikan kembali. Kebijakan suku bunga, kondisi nilai tukar kembali akan mentransisikan ke sektor riil.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terjadi ternyata bergantung pada tumpukan hutang dan pinjaman luar negeri. Hal itu menunjukkan proses itu tidak dilandasi oleh model pembangunan domestik yang mempunyai fokus pada kekayaan sumberdaya alam dan tenaga kerja lokal yang berkualitas. Perkembangan sektor pertanian periode ini masih dicirikan lebih mengandalkan produksi bahan mentah, dan belum berhasil mengembangkan agroindustri yang mampu menghela pembangunan pedesaan. Bahkan, industrialisasi di wilayah pedesaan tidak berjalan dengan semestinya. Ada kecenderungan proses tersebut meninggalkan pendekatan regional dan ekonomi sumberdaya yang menginginkan industrialisasi bertumpu pada hasil sektor pertanian agar perekonomian daerah dapat berkembang mandiri. Hal yang terjadi adalah perkembangan ekonomi artifisial dicapai dengan komersialisasi sumberdaya alam, seperti batu bara, minyak dan gas bumi, pasir dan hasil laut, serta hutan.

Dampak strategi perkembangan pertumbuhan ekonomi tinggi sebenarnya sudah mulai terlihat adanya ketidakmerataan proses pembangunan yang mengakibatkan kesenjangan sosial. *Growth-led strategy* sebagaimana diindikasikan ternyata lebih mengandalkan pada eksploitasi sumberdaya alam daripada produktivitas sumberdaya manusia. Oleh karenanya, investasi bisnis yang terjadi sering diikuti oleh kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Belum lagi, pada waktu ini berbagai pihak banyak mengingatkan, bahwa kesejahteraan masyarakat tidak tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang digerakkan teori ekonomi "*mainstream*", mengalami kejutan sosial di daerah. Di satu sisi, memang masyarakat dari kota sampai ke desa-desa telah bertambah jumlahnya yang dapat menikmati penerangan listrik, prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Akan tetapi di sisi lain, ada masyarakat yang mulai terpinggirkan dari proses pembangunan kearah modernisasi tersebut. Masyarakat semakin terjadi pelapisan sosial: yang kaya dan berkecukupan berbanding dengan mereka yang menjadi petani miskin dan buruh tani tak bertanah.

Salah satu dampak yang dahsyat daripada krisis finansial global 2008 (KRISIAL 08) adalah ledakan pengangguran sebagai akibat hancurnya industri manufaktur dan kegiatan sektor riil yang terkait dengan "credit crunch" dan "bad-debt" dari sektor perbankan. Di USA, angka pengangguran melejit lebih dari 9.5% total angkatan kerja. Di Indonesia, meskipun belum terasa adanya lonjakan PHK besar-besaran, tapi paling tidak dengan melambatnya perekonomian maka perluasan lapangan kerja baru menjadi terhambat. Hal ini lebih mengkhawatirkan bilamana terjadi pelemahan sektor pertanian dan pedesaan sehingga meningkatkan urbanisasi secara masif ke kota-kota besar. Kondisi ini bisa memicu keresahan dan kerusakan sosial. Berikut dapat digambarkan pertumbuhan PDB dan tingkat pengangguran di Indonesia.



Gambar 1.1. Pertumbuhan PDB dan Pengangguran Indonesia

Kondisi dan perkembangan yang demikian mengingatkan, bahwa kemiskinan perlu terus diperhatikan karena akan terus ada walaupun pertumbuhan ekonomi mengesankan. Krisis keuangan pada Tahun 1997/98, selanjutnya semakin membangun kesadaran adanya kekeliruan menerapkan prinsip pembangunan yang lebih mengutamakan investasi, ketimbang keadilan sosial dan pemerataan pendapatan. Bahkan, krisis tersebut berlanjut dengan krisis multi dimensi. Mulai dari kemiskinan, krisis pangan, krisis ekologi, krisis energi sampai pada krisis pemerintahan (*governance crisis*). Keuangan itu juga menyadarkan pada hal penting yaitu ada fenomena "decoupling" antara sektor finansial dan sektor riil,

sehingga ketika krisis semakin mendalam akan dirasakan oleh sektor besar dan modern yang padat kandungan instrumen keuangan. Meskipun, pada krisis keuangan 1997/98 yang selanjutnya pada pembentukan kondisi lebih buruk dapat diredam oleh perkembangan sektor tradisional dan berskala mikro yang sering disebut sebagai sektor ekonomi rakyat.

Para pakar yang memberi perhatian terhadap krisis hingga saat ini, sebenarnya mengalami kesulitan untuk menguraikan dan menemukenali simpul dan jaringan keterkaitan antara sektor sebagai salah satu upaya untuk menemukan cara pengendalian dampak krisis keuangan yang terjadi saat ini. Sementara itu, proses krisis keuangan/finansial global (KRISIAL) tahun 2008 masih terus berlanjut bersamaan dengan krisis global yang lain seperti perubahan iklim global, proses pemiskinan dan kemiskinan, serta merebaknya tindak kekerasan dan peperangan sehingga dampak KRISIAL 2008 ini diperkirakan akan semakin terus dirasakan pada tahun-tahun mendatang. Cepat atau lambat, dampak itu akan mempengaruhi hal-hal kebutuhan pokok kemanusiaan, seperti ketersediaan pangan dan kesehatan. Bahkan, dampak yang terjadi akan memperlambat pembangunan pertanian dan dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat desa yang masih menjadi bagian terbesar dari penduduk Indonesia bahkan dunia. Untuk itu, dalam rangkaantisipasi dan meminimalisasi dampak KRISIAL 2008, maka Institut Pertanian Bogor telah berinisiatif melakukan penelitian kebijakan yang berkaitan dengan riset terapan didalam rekayasa protokol manajemen krisis yang sedang berlangsung, khususnya pada aktivitas penyediaan pangan, pembangunan pertanian dan pedesaan.

Penelitian kebijakan sebagaimana disebutkan di atas, dilaksanakan oleh tim *Special Interest Group - SIG* yang mempunyai latar belakang keilmuan yang beragam. Tim ini berada dalam wadah kelompok kerja yang dibentuk Rektor IPB melalui Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor 167/13/PL/2008, dan dikelola melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Institut Pertanian Bogor. Adapun, fokus penelitiannya adalah mempelajari dan mengembangkan metodologi aktual terhadap penanganan krisis, khususnya didalam kerangka keswadayaan pangan, dan pembangunan pertanian serta perdesaan pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu cakupan kajian akan mengarah pada pengembangan analisis yang bedasarkan pada prinsip transdisiplin yang meliputi tataran keilmuan teknologi, ekonomi-sosial (*social-economics*) dan budaya, sedangkan pembahasannya meliputi ranah ekonomi kelembagaan, etika ekonomi, dan desain mekanisme ekonomi baru.

Saat ini dunia sedang disibukkan oleh krisis finansial global yang bermula di AS dan dampaknya pun berimbas pada perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Indonesia

pernah mengalami krisis moneter (tahun 1997/1998) yang cukup parah sehingga berdampak pada terpuruknya perekonomian nasional pada saat itu. Istilah krisis seolah sudah tak asing lagi di kehidupan ekonomi Indonesia. Sebenarnya apakah definisi dari krisis itu sendiri? Krisis didefinisikan sebagai suatu kejadian mendadak yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan lembaga untuk menjalankan fungsinya. Pada umumnya penetapan parameter krisis dalam bisnis dimana terkait dengan manajemen resiko kuantitatif, meskipun sudah disadari bahwa dunia nyata belum tentu berperilaku secara acak dengan bentuk yang teratur. Teknik ekonometrik yang banyak dipraktikkan dalam mazhab neo-klasik mengkategorikan sifat acak tersebut sebagai perilaku yang dapat dianalisa, sedangkan apa yang terjadi di pasar uang ataupun pasar modal adalah ketidakteraturan yang disebabkan proses umpan balik yang positif. Asumsi yang diakui oleh paham neo-klasik yaitu berlakunya prasyarat statistik ternyata hal ini terbukti tidak sah di praktek pasar finansial. Padahal bila memakai alat analisa yang salah berdasar teori yang salah, maka jawabannya pun pasti salah.

Sedangkan krisis finansial menurut Sumitro Djoyohadikusumo (1991) adalah peristiwa yang meledak akibat konflik antara kekuatan yang saling bertentangan kepentingan yang ditandai dengan runtuhnya bidang keuangan dan perbankan, yang diawali dengan kegagalan satu-dua lembaga keuangan. Gejala kebangkrutan tidak terbatas pada lingkungan keuangan dan perbankan, menjalar ke dunia usaha secara umum yang mengawali keruntuhan sistem ekonomi. Gejala awal krisis adalah tingginya beban hutang pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditandai dengan pola hidup dan tingkat konsumsinya bersandarkan pada kredit dan rupa-rupa pinjaman lainnya. Gejala tersebut diperparah dengan adanya akuisisi bisnis yang dilayal pinjaman besar-besaran dari perbankan dan didorong oleh spekulasi yang bertualang di pasar-pasar modal serta dipicu oleh nafsu serakah (*greed*) yang tidak kenal batas.

Agar dapat memahami kebijakan publik apa yang kiranya patut dijalankan dalam upaya pemulihan dan penanggulangan krisis, maka naskah akademik ini merujuk pada analisa tekstual dari dokumen publik maupun pustaka "*grey materia*". Adapun sustansi kepustakaan yang dirujuk secara komprehensif meliputi: (1) Krisis Finansial Global tahun 2008, (2) Krisis Moneter 1997/1998 di Indonesia dan (3) Jaring Pengaman Sosial yang pada tahun 1999/2000 dikoordinasikan oleh Bappenas. Dari ketiga sumber informasi tersebut diharapkan dapat ditarik kesimpulan berharga untuk menghadapi dampak krisis finansial global pada tataran pertanian dan perdesaan.

Pendekatan Sistem

Naskah akademik ini difokuskan pada pengembangan protokol manajemen krisis di dalam struktur fungsional penelitian yang terdiri dari dua bagian yang saling berkaitan yaitu:

- Aspek yang bersifat metodologis (*methodological aspect*)
- Aspek yang bersifat substansi (*substantial aspect*), dengan empat substansi sektor pertanian yaitu persoalan ketenagakerjaan, penyediaan pangan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro dalam rangka perluasan peluang berusaha dan bekerja, serta pengembangan tindakan darurat untuk merespon KRISIAL 2008.

Kajian dilakukan dengan beragam teknik yaitu *desk study* untuk menganalisa isi atau *content analysis*, *Focus Group Discussion (FGD)* dan *Discourse and Narrative Analysis*. Sedangkan pengembangan protokol manajemen krisis akan menerapkan *Morphology Technique* dan *Nominal Group Technique* (Zwicky, 1997). Kajian ini akan difokuskan pada substansi pertanian dalam arti luas dan wilayah pedesaan, dan semua hasilnya Interaktif dengan penerapan dan pengembangan aspek yang bersifat metodologis.

Studi ini bukan menyandarkan pada metode penelitian "*an sich*" dan juga tidak memakai teknik analisa kebijakan yang standar, namun telah menerapkan mekanisme perumusan yang sinergetik daripada berbagai sumbu-sumbu kecerdasan yaitu:

- Penelitian terdahulu yang telah dipresentasikan pada forum ilmiah
- Rujukan kepustakaan yang sah, termasuk penggunaan "*grey-materials*"
- Diskusi lintas disiplin dan konsultasi pakar untuk pematangan pembahasan dari hasil perumusan
- Penjarangan ide inovatif sebagai sarana pencarian solusi persoalan krisis

Teknik analisa kebijakan yang menjadi landasan proses perumusan Naskah Akademik ini mengandung unsur analisa situasional, analisa sektoral dan analisa prospektif. Mengingat kompleksitas manajemen krisis, maka pengintegrasian pemikiran lintas pelaku dan multidisiplin menggunakan Pendekatan Sistem (*System Approach*).

Dalam *Soft System Methodology* terdapat berbagai teknik yang digunakan dalam memperoleh ataupun menganalisa input penelitian termasuk untuk penelitian

kebijakan. Mengingat kebijakan publik adalah pengetahuan yang bersifat multidisipliner, tentunya untuk menghasilkan sintesa yang mendalam dan komprehensif tidak cukup bila hanya menggunakan satu metoda saja. Dan peneliti juga menyadari bahwa setiap teknik (*complementarism*) memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dengan menggunakan kombinasi teknik yang tepat dapat mempertajam analisis, meningkatkan mutu disain dan meminimalisasi bias dalam penelitian.

Metode *Strategic Assumption Surfacing and Testing* (SAST) merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menyusun alternatif kebijakan berdasarkan asumsi-asumsi. Tahapan dalam metoda ini, antara lain:

- Tahapan Pembentukan Kelompok (*Group Formation*) yang bertujuan untuk membentuk kelompok dengan peserta yang memiliki *criteria advocates of articular strategies; vested interest; personality type; manager from different functional areas; manager from different organizational levels; time orientation (short/long term perspective)*. Sebagai contoh dalam penelitian kebijakan kami terdapat pakar kebijakan, pakar usaha kecil, pakar lingkungan, praktisi (pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau besar sejenis) dan tokoh masyarakat.
- Tahap Pengedepanan (Memunculkan) Asumsi (*Assumption Surfacing*), dimaksudkan untuk menggali berbagai asumsi yang paling signifikan melalui diskusi kelompok untuk mendukung kebijakan dan strategi yang diinginkan. Dalam tahap ini peserta melakukan analisis terhadap beberapa parameter melalui FGD sehingga diperoleh asumsi-asumsi dasar yang secara signifikan berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mendukung pencapaian hasil dalam tahap ini antara lain:

- 1) *"Who is affected by the strategy?"*
- 2) *"Who has can interest in it?"*
- 3) *"Who can affect its adoption, execution or implementation?"*
- 4) *"Who cares about it?"*

Sebagai contoh dalam penelitian kami adalah parameter tersebut meliputi perilaku pengusaha dalam hal (1) penggunaan bahan baku, (2) proses produksi, (3) pengolahan limbah, (4) pembuangan limbah, (5) penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pelaksanaan kebijakan yang ada, peran serta masyarakat, dan peran pemerintah.

Selanjutnya hasil analisis berupa alternatif asumsi dinilai tingkat kepentingan dan kepastiannya dengan menggunakan Tingkat Peringkatan Asumsi dengan melibatkan beberapa pakar. Pada penerapan Tingkat Peringkatan Asumsi diajukan pertanyaan kepada masing-masing pakar tentang: seberapa penting pengaruh asumsi tersebut terhadap keberhasilan atau kegagalan strategi yang dimaksud? (memakai skala jawaban “paling tidak penting” sampai “paling penting”); dan juga seberapa jauh keyakinan bahwa asumsi tersebut dapat dibenarkan? (memakai skala jawaban “paling tidak pasti” sampai “paling pasti”).

- **Tahap Pembahasan Dialektik**, dimaksudkan untuk membuat kasus kemungkinan strategi terbaik yang diinginkan, melalui diskusi pakar. Proses ini dilakukan melalui perdebatan terbuka dalam diskusi untuk membahas : (1) asumsi-asumsi mana yang berbeda, (2) asumsi-asumsi mana yang dianggap oleh setiap anggota kelompok sebagai asumsi yang paling bermasalah. Proses “modifikasi asumsi” ini tetap berlanjut selama masih dapat diraih kemajuan melalui proses perdebatan terbuka.
- **Tahap Sintesis**, untuk mencapai kompromi atas asumsi-asumsi yang dapat menghasilkan strategi baru yang harus mampu menjembatani atau mengguguli strategi lama.

Menurut Mason, keuntungan dalam metode SAST ini terletak pada *dialectical approach* banyak alternatif/strategi para pakar yang dibangun dalam perencanaan berdasarkan pada bukti yang baik. Disini juga sekaligus merupakan kekurangannya dimana banyaknya asumsi yang dikemukakan tidak dapat tercover seluruhnya, selain itu juga adanya pendapat yang sangat berlawanan dapat berpengaruh pada upaya untuk menghasilkan rencana yang aman untuk menghindari kritik.

Manajemen Krisis

Crisis Management (CM) merupakan pengetahuan yang relatif baru baik di Indonesia maupun di dunia. Definisi CM pun sangat bervariasi sehingga lebih dikenal sebagai prosedural model atau protokol daripada batasan ilmiah yang definitif. Secara ringkas dapat dikatakan, bilamana kejadian yang tidak diharapkan terjadi, CM adalah suatu cara pengelolaan yang proaktif dari berbagai kegiatan kelembagaan yang mengarah pada keberlanjutan fungsinya sesegera mungkin setelah adanya gangguan tersebut.

Kegiatan CM yang proaktif dicirikan oleh Prakiraan Potensi Krisis (*forecasting*) dan Perencanaan Pengendaliannya (Avecedo, 2007). CM berupaya untuk menemukan

asal muasal krisis dan karakteristiknya, kemudian meminimalkan kerusakan yang telah terjadi dan akhirnya pemulihan krisis itu sendiri. Oleh karena adanya sistem sosial maka umumnya kerusakan suatu sistem melibatkan faktor-faktor dinamis didalam organisasi. Setiap resiko yang mengakibatkan kerusakan perusahaan bisa menimpa sasaran yang berbeda sehingga CM harus menghadapi setiap sasaran tersebut secara berbeda pula, terutama dalam pengendalian situasi.

Crisis Management Protocol (CMP), sifat perencanaannya hampir mirip cetak biru pada level strategis (*strategic blue print*) yang secara rinci mengungkapkan komunikasi publik seperti:

- Bagaimana menjelaskan pada setiap pihak yang terkena dampak krisis
- Bilamana organisasi menyerang balik pada para aktor penyebab krisis
- Apa peran organisasi yang ingin digambarkan
- Arah pertanyaan dari pada jurnalis

Secara umum, CMP seyogyanya sangat peduli terhadap regulasi organisasi dan pengendalian dampak sebagaimana dilihat dari sudut pandang oleh beragam pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung terlibat di organisasi.

Bagian terpenting dari CMP adalah antisipasi terhadap peluang dapat melalui sebuah krisis atau keadaan darurat. Pihak yang berada langsung di organisasi dan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah. Namun seringkali, ada faktor yang diluar kendali justru menempatkan organisasi di posisi krisis. Pada kondisi kacau ini, metode yang sederhana harus digunakan untuk menjamin bahwa reputasi organisasi tidak dalam bahaya. CMP dengan "*simple house rule*" di dalam organisasi adalah:

- Sampaikan kebenaran, sebab anda selalu diawasi, terlebih lagi bilamana anda tidak berada pada kondisi terbaik
- Bila berbuat keliru, segera minta maaf dengan tulus
- Apabila anda menjelaskan, anda kalah. Penjelasan akan mengurangi makna permintaan maaf.
- Selesaikan masalah dengan sungguh-sungguh, menghindari masalah bukan berarti masalah pergi begitu saja.
- Menyalahkan pihak lain tidak memberikan nilai bagi anda.

- Krisis membuat kekosongan. Kalau anda tidak mengisi kekosongan dengan kepemimpinan, orang lain akan masuk.
- Perhatikan atasan dan yakinkan dia dengan langkah anda.

Dengan protokol yang sangat sederhana tersebut, diharapkan masyarakat diarahkan untuk percaya bahwa organisasi tersebut jujur (*honest*) serta sangat peduli terhadap persoalan krisis. Ketidak-acuhan atas masalah atau menyalahkan pihak lain tidak akan menaikkan citra, akan tetapi di beberapa kasus, organisasi harus hati-hati untuk tidak serta merta menerima semua beban bagi perihal yang sebenarnya bukan atas kesalahannya, karena kerugian akan jauh lebih besar dari sebenarnya.

Sejauh ini, faktor-faktor penyebab kejatuhan organisasi ditengarai sebagai berikut:

- Orang dalam yang tidak etis (*white collar crime*)
- Kesalahan pihak ketiga (*third party*)
- Ulah pesaing (*intruders*)
- Bencana alam dan kerusakan sosial
- Faktor finansial seperti runtuhnya pasar modal dan inflasi

Untuk merencanakan CMP, terlebih dahulu organisasi harus sadar bahwa faktor-faktor krisis tersebut bisa terjadi, dan memperlakukan sama terhadap setiap faktor seperti disaat krisis terjadi karena kesalahan organisasi. Meskipun kecil kemungkinan menghadapi litigasi, organisasi dapat menyampaikan CMP untuk menjamin pelanggan bahwa ada rencana cadangan untuk hal tersebut. Hal ini memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat dan reputasi organisasi tetap tinggi atau malahan jadi lebih baik. Konsep ini berlaku untuk semua jenis organisasi termasuk lembaga pemerintahan.

Dalam merumuskan CMP, harus dicermati faktor-faktor kunci (*key features*) dimana keseluruhan organisasi di setiap tingkat mengerti dan berkomunikasi secara efektif. Keputusan yang penting dibuat agar terjamin aliran informasi ke setiap tingkat organisasi. Perencanaan CMP membutuhkan suatu tim pakar yang mampu memberikan alokasi serta memberi bantuan keahlian pada pimpinan dalam mengarahkan kegiatan pencegahan dan pemulihan krisis. Tim pakar tersebut harus memperhatikan bahwa untuk setiap tingkat perencanaan terdapat interaksi personel serta dipandu oleh ahli di bidangnya. Koordinasi politis

sebaiknya diserahkan pada wilayah fungsional dimana para pengambil keputusan dari tim CMP diintegrasikan dengan komunikasi yang lancar.

Pemahaman yang mendalam akan krisis dapat mencegah terjadinya krisis atau mengurangi daya rusaknya apabila terjadi. Ini adalah hipotesa konseptual yang didasari pengkajian holistik serta *anti-chaos theory*. Sistem ekonomi-sosial yang amat aman pun tidak bisa kebal terhadap kegagalan, sebagaimana kemajuan dari masyarakat akan selalu mengundang ancaman-ancaman baru setiap hari. Setiap saat teknologi baru diketemukan beserta cara-cara pengamanannya, maka disaat lain selalu timbul cara untuk merusak sistem tersebut hingga gagal. Misalnya di sektor teknologi informasi, secanggih apapun perangkat lunaknya, selalu ada kemungkinan gagal karena serangan (*hackers*) dari internal maupun eksternal. Persoalannya adalah, apa yang harus dikerjakan oleh suatu lembaga finansial bilamana sistemnya gagal?

Kompleksitas permasalahan yang dikaji mendorong pengolahan data simbolik yaitu basis pengetahuan (*knowledge*) daripada data numerik yang bukan saja akurasinya tidak "*reliable*" juga dinamikanya sangat tinggi, fluktuatif dan "*anti-trend*". Identifikasi faktor kritis dilakukan terkait *morphology* yang mencakup:

- Pemetaan, pendefinisian dan identifikasi persoalan
- Eksplorasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi solusi
- Kategorisasi faktor-faktor tersebut
- Analisa keterkaitan antar faktor
- Evolusi untuk membentuk kriteria solusi.

Dalam Interpretasi faktor atas dasar perumusan elemen terkait digunakan nominal *group technique* yang diawali dengan pembangkitan ide, presentasi bergilir, klarifikasi elemen dan diskusi terbuka untuk elemen yang terseleksi.

Melalui studi kasus dari beberapa Intitusi finansial, termasuk perbankan dan asuransi, baik di dalam maupun di luar negeri sejak krisis global terjadi, maka akan dapat dipahami perencanaan tindakan darurat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun dunia usaha pada masa sekarang serta berbagai program baru yang inovatif. Dengan menyatakan faktor-faktor krisis maka selanjutnya dapat dibangun model-model prediktif sebagai bagian dari sistem deteksi dini (*early warning system*).

Hasil riset kelembagaan dengan teknik morfologis ini menyatakan bahwa memelihara kepercayaan (*trust*) pelanggan dan tingkat kerahasiannya (*confidentiality*) merupakan kewajiban utama dari lembaga finansial. Perbankan harus membina kebijakan yang mengkhhususnya pada tujuan perusahaan, sekaligus memberi jaminan bahwa teknologi informasinya berhubungan erat dengan perencanaan dan target organisasi. Lembaga keuangan juga perlu mengikuti peraturan perundangan dalam menyimpan informasi pelanggannya. Dengan menilai faktor resiko yang bias menghalangi pencapaian tujuan organisasi, perusahaan memanfaatkan manajemen resiko dalam rangka menjamin kerahasaan informasi. Resiko yang substansial dapat meliputi reputasi, rusaknya citra, tindakan litigasi dan penerapannya, terganggunya operasi serupa dengan kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, sehingga perusahaan bisnisnya benar-benar hancur. Yang jadi persoalan adalah bagaimana bisa lembaga dapat meneruskan operasi bisnisnya sambil sementara menjalani upaya pemulihan (*recovery*). Selanjutnya, bagaimana rencana tindak darurat mampu menghadapi ketidakpastian serta data yang tidak lengkap.

Pada kasus perbankan, terdapat hukum yang melindunginya keamanan informasi dan kerahasaan dari data pelanggan. Aturan tersebut menyarankan langkah-langkah pencegahan atas akses yang tidak diotorisasi dari pegawainya sendiri (sumber sabotase internal), dan dilain pihak juga dipasang pengaman anti *cyber-terror* serta ancaman luar terhadap keamanan informasi. Perencanaan kedepan termasuk pengelolaan contoh kasus Tylenol dari perusahaan Johnson & Johnson. Perusahaan lantas mengakui kemungkinan ada beberapa botol tercemar, dan lantas menarik semua produk untuk menghindari kerusakan nilai lanjut bagi pelanggan. Tindakan ini kemudian justru menjadi nilai positif sebab masyarakat menilai Johnson & Johnson adalah perusahaan yang bertanggungjawab dan peduli pelanggan. Dalam jangka pendek biaya litigasi mahal, namun dalam jangka panjang biaya tersebut tergantikan melalui ekspresi tanggungjawab.

Berdasarkan studi kasus pada lembaga finansial, CMP secara umum dirumuskan melalui analisa faktor terhadap semua kemungkinan jenis krisis yang dihadapi yaitu:

- **Krisis Keuangan** termasuk masalah likuiditas jangka pendek dan aliran kas serta kebangkrutan di jangka panjang. Faktor krisis adalah tindakan kriminalitas dari staf maupun eksekutif (contoh kasus Bernard Madoff) serta pihak ketiga yang terkait dengan organisasi seperti kasus Enron, Anderson, Worldcom dan sebagainya (2002) dimana perusahaan kemudian jadi kolaps.

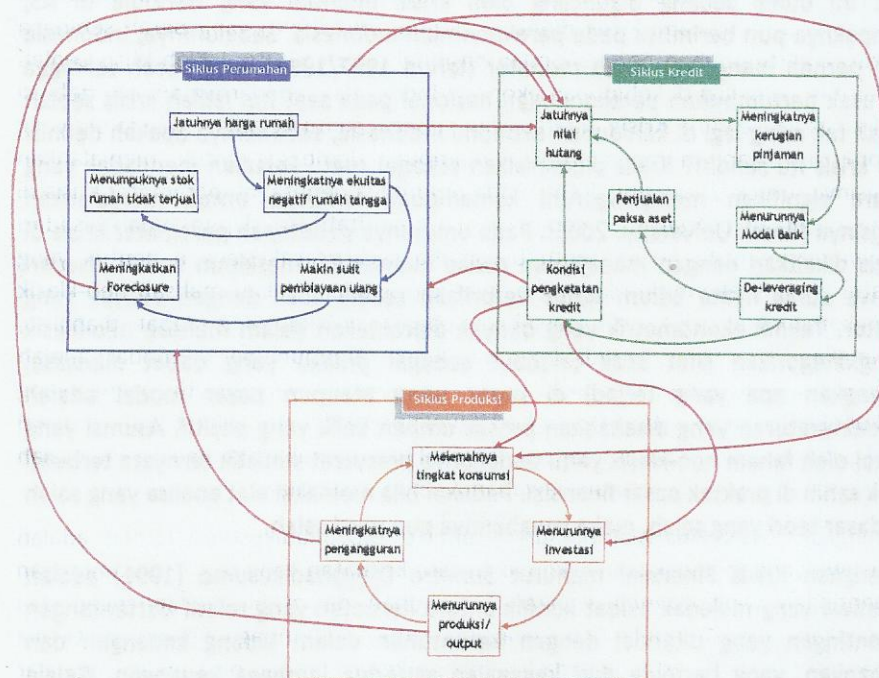
- **Krisis Hubungan Publik** yang lebih dikenal dengan krisis komunikasi yaitu adanya faktor publikasi negatif yang menghambat suksesnya perusahaan.
- **Krisis Strategi** yakni perubahan dari faktor lingkungan bisnis yang membuat kelayakan usaha dipertanyakan. Sebagai misal, adanya pesaing baru dengan teknologi yang lebih maju daripada yang dimiliki perusahaan. Variasi dari faktor ini cukup banyak.
- **Krisis Bencana Alam** dimana faktor perubahan dari lingkungan alam yang membawa malapetaka seperti banjir, kebakaran, longsor dan sebagainya sehingga menyebabkan perusahaan harus merubah lokasi maupun jadwal kegiatannya. Disisi lain dapat dibangkitkan faktor sosial dari perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan sumberdayanya menolong masyarakat yang terkena musibah. Hal ini menaikkan reputasi organisasi semasa krisis.

Saat ini dunia sedang diguncang oleh krisis finansial yang bermula di AS, dampaknya pun berimbas pada perekonomian Indonesia. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalami krisis moneter (tahun 1997/1998) yang parah sehingga merusak pertumbuhan perekonomian nasional pada saat itu. Istilah krisis seolah sudah tak asing lagi di kehidupan ekonomi Indonesia, sebenarnya apakah definisi dari krisis itu sendiri? Krisis didefinisikan sebagai suatu kejadian mendadak yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan lembaga untuk menjalankan fungsinya (Brock University, 2005). Pada umumnya penetapan parameter krisis di bisnis dikaitkan dengan manajemen resiko kuantitatif, meskipun sudah disadari bahwa dunia nyata belum tentu berperilaku secara acak dengan bentuk yang teratur. Teknik ekonometrik yang banyak dipraktikkan dalam mahsab neo-klasik mengategorikan sifat acak tersebut sebagai perilaku yang dapat dianalisa, sedangkan apa yang terjadi di pasar uang ataupun pasar modal adalah ketidakteraturan yang disebabkan proses umpan balik yang positif. Asumsi yang diakui oleh faham neo-klasik yaitu berlakunya prasyarat statistik ternyata terbukti tidak sah di praktek pasar finansial. Padahal bila memakai alat analisa yang salah berdasar teori yang salah, maka jawabannya pun pasti salah.

Sedangkan **Krisis Finansial** menurut Sumitro Djyohadikusumo (1991) adalah peristiwa yang meledak akibat konflik antara kekuatan yang relatif bertentangan kepentingan yang ditandai dengan keruntuhan dalam bidang keuangan dan perbankan, yang bermula dari kegagalan satu-dua lembaga keuangan. Gejala kebangkrutan tidak terbatas pada lingkungan keuangan dan perbankan, menjangar ke dunia usaha secara umum yang mengawali keruntuhan sistem ekonomi. Gejala awal krisis adalah tingginya beban hutang pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana pola hidup dan tingkat konsumsinya disandarkan pada kredit

dan rupa-rupa pinjaman lainnya. Gejala tersebut diperparah dengan adanya akuisis bisnis yang lazimnya dibiayai pinjaman besar-besaran dari perbankan dan didorong oleh spekulasi yang bertualang di pasar-pasar modal serta dipicu oleh nafsu serakah (*greed*) yang tidak kenal batas.

Krisis Finansial Global meletus pada tanggal 8 Oktober 2008 dimana terjadi kepanikan di pasar modal USA, dalam dua hari Wall Street kehilangan 65.000 triliun Rupiah akibat runtuhnya harga saham (S&P BMI-Global Index, 2008). Sebenarnya malapetaka di Wall Street sudah diindikasikan sejak 2005 dimana telah terjadi krisis kredit perumahan yang kurang layak (*sub-prime*). Pada waktu itu terhitung 14.000 triliun rupiah menguap, dimana salah satu bank ternama Lehman Brother merugi 600 triliun rupiah. Namun, keterbatasan pengetahuan akan gejala krisis tersebut, membuat Bank Central USA (The FED) pada April 2008 menyatakan sudah redanya gejala tersebut.



Gambar 1.2. Siklus Krisis Finansial Global 2008

Menurut Wen Jiabao, Perdana Menteri China pada pertemuan WEF di Davos bulan Februari 2009, telah terjadi kegagalan supervisi dan regulasi di sektor keuangan untuk mendampingi percepatan inovasi finansial yang ekspansif dan berisiko tinggi serta meluas. Akibatnya pada saat meletusnya krisis finansial global di awal Oktober 2008, banyak korban berjatuhan. Salah satunya, Lehman dinyatakan bankrut pada tanggal 17 Oktober 2008. Nilai sahamnya yang pada tahun 2007 sebesar 67.73\$ anjlok menjadi 0,22\$. Pemerintah USA akhirnya harus merogoh kocek sebesar 7000 triliun rupiah untuk mencegah keruntuhan institusi finansialnya, termasuk perusahaan asuransi terbesar AIG disuntik dana 850 triliun rupiah yang sampai Maret 2009 tetap bermasalah. Siklus krisis finansial global dapat digambarkan pada Gambar 1.2.

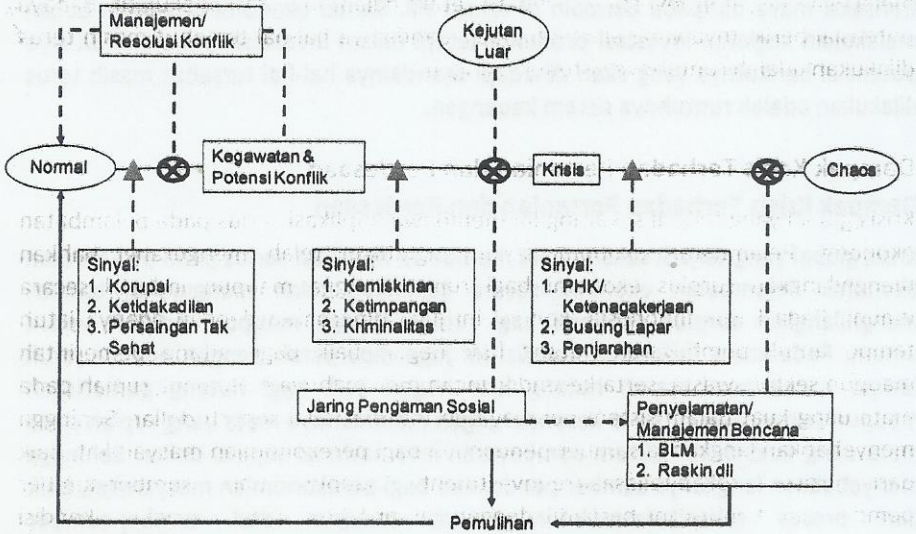
Kesimpulan dari proses krisis keuangan global 2008 ini, bahwa kapitalisme modern saat ini rapuh karena dibangun dengan *monetary based economy* bukan *real based economy*. Artinya, sektor ekonomi banyak dikembangkan berdasarkan transaksi maya daripada bermain di sektor riil. Rantai ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dalam investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan dihadapi seandainya hal-hal tersebut masih terus dilakukan adalah runtuhnya sistem keuangan.

Dampak Krisis Terhadap Pertanian dan Perdesaan

Krisis global yang terjadi sekarang ini membawa implikasi serius pada pelambatan ekonomi. Pelambatan ekonomi secara signifikan telah mengurangi bahkan menghilangkan surplus ekonomi bagi rumah tangga maupun industri secara umum. Pada kasus Indonesia, kondisi ini juga diperparah dengan adanya jatuh tempo untuk pembayaran hutang luar negeri baik bagi hutang pemerintah maupun sektor swasta, serta kecenderungan melemahnya mata uang rupiah pada mata uang kuat dalam sistem pembayaran internasional seperti dollar. Sehingga menyebabkan langkanya sumber pendanaan bagi perekonomian masyarakat, baik dari proses rekapitalisasi/re-investment maupun dari sumber-sumber pembiayaan. Kondisi ini berpadu dengan faktor-faktor yang melingkupi kondisi pertanian secara umum (karakteristik usaha serta perubahan kondisi alam) akan dapat memarjinalkan sektor pertanian. Sehingga menuntut intervensi yang kuat dari pemerintah untuk mencegah kondisi ini terjadi. Tuntutan intervensi ini dilandasi oleh adanya kepentingan terhadap sektor pertanian bagi kepentingan nasional seperti telah diuraikan diatas. Intervensi ini dalam jangka pendek menjadi katup sosial bagi sektor pertanian secara umum, yang bersifat *emergency respons* adanya dampak krisis global yang pada dasarnya berguna baik bagi petani secara

luas, maupun masyarakat Indonesia. Intervensi ini diperlukan sebagaimana diungkapkan oleh Stiglitz (2005) salah satu sumber penting terjadinya kegagalan pengendalian ekonomi sampai terjadi keterpurukan adalah hilangnya visi mengenai peran pemerintah yang berimbang, dimana bila mekanisme pasar dikembangkan bekerja secara penuh, maka fungsi ini tidak berjalan dengan baik karena adanya struktur informasi yang asimetris (*asymmetric information*).

Jika krisis ini tidak segera ditanggulangi, maka masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sebagian besar (60%) berada di pedesaan yang akan paling merasakan dampak krisis ini. Padahal pedesaan merupakan basis kegiatan pertanian sebagai penopang sumber pangan dan gizi masyarakat yang sangat penting. Jika masyarakat desa tidak berdaya, mesin penyedia pangan akan terhenti dan satu-satunya harus ditopang dari impor. Jika negara ini harus mengimpor pangan sementara keuangan negara sedang dalam kondisi krisis, maka pembangunan akan mengalami perlambatan yang serius.



Gambar 1.3. Protokol Manajemen Krisis

Secara spesifik, dampak perlambatan ekonomi telah memberikan dampak nyata pada pasar finansial, yang telah menjadi pemicu adanya krisis global. Hal ini terjadi dimana aset-aset masyarakat (rumah tangga) atau suatu perusahaan (*firm*)

mengalami penurunan karena menurunnya nilai klaim terhadap *asset* tersebut. Sebab *asset-asset* finansial sebenarnya hanya merupakan klaim terhadap asset fisik, dimana sebagian klaim ini mengalami penurunan yang sangat besar. Pelemahan dan kebangkrutan perusahaan-perusahaan finansial di Amerika Serikat pada awal tahun 2008 telah menyebabkan efek domino pada keruntuhan pada perusahaan-perusahaan finansial dunia lainnya. Kondisi ini telah dingatkan oleh Stiglitz (2005) dengan adanya kecenderungan penggelembungan ekonomi (*bubble economic*) karena dipicu oleh kegalrahan yang irasional (*irrational exuberance*), praktek-praktek akuntansi yang tidak transparan serta pemotongan pajak-pajak *capital gains*. Kejadian selanjutnya menjadi sangat signifikan pada perekonomian karena sebelumnya perusahaan-perusahaan finansial telah menjalankan fungsi-fungsi *intermediary* yang sangat penting pada mekanisme-mekanisme pembiayaan baik pada Industry barang atau jasa. Secara global, kondisi ini menyebabkan turbulensi ekonomi yang dipicu oleh merosotnya pertumbuhan ekonomi negara atau blok negara dan dapat memicu stagflasi ekonomi dunia seperti jaman *great depression* atau malaise. Dampak ini sangat nyata juga dirasakan oleh perekonomian Indonesia, yang belum sepenuhnya pulih dari krisis multidimensi sejak tahun 1998. Hal ini diindikasikan oleh revisi target-target pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun.

Kondisi seperti ini memerlukan Intervensi untuk melindungi sektor utama yang menjadi penyangga kehidupan bangsa yakni pertanian. Intervensi ini diperlukan secara cepat dalam aspek yang menyeluruh khususnya untuk perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian di Indonesia. Hal ini dilakukan karena pertanian secara umum di Indonesia menghadapi kendala pasar yang sangat asimetris baik pada pasar input atau output. Pada pasar input, keterbatasan kapital serta kondisi efisiensi usaha yang tidak sama dengan sektor industri input produksi, menyebabkan petani sebagai *price taker*. Demikian pula pada pasar output dengan karakteristik *highly perishable* serta keterbatasan kapital untuk operasional serta kehidupan sehari-hari, menyebabkan petani terjebak pada praktek ljon baik langsung maupun tidak langsung. Tidak adanya kekuatan penyangga (*buffer power*) baik formal maupun non-formal yang dapat meningkatkan *positioning* petani pada pasar input maupun output, menjadikan petani sangat rentan terhadap turbulensi ekonomi. Bahkan ketika pada konsep agribisnis, kondisi ini bisa tidak terjamin karena posisi tawar *on-farm* selalu lebih rendah dari *backward* maupun *forward linkage*-nya.

Secara umum, kondisi pertanian Indonesia mengalami tekanan baik yang bersifat eksogen maupun endogen karena adanya keterbatasan capital, karakteristik usaha maupun perubahan kondisi alam. Faktor-faktor tersebut berpengaruh

sangat nyata baik sebagai faktor pendorong maupun faktor penarik atas kondisi marginal pertanian secara umum. Pada sisi lain, permintaan akan produk pertanian pada umumnya bersifat inelastik karena terkait dengan makanan pokok (*staple food*) atau menjadi sumber bahan pangan penting semisal protein. Artinya, kebutuhan akan produk tersebut tidak dapat bereaksi secara cepat terhadap perubahan pasokan maupun harga. Sehingga walaupun produksi mengalami penurunan, maka permintaan tidak secara langsung mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan terjadinya dampak ganda karena adanya kelangkaan (*scarcity*) yang dicirikan oleh adanya pasokan produk yang terbatas tetapi diikuti oleh peningkatan harga. Disamping menjadi pangan utama, produk pertanian juga menjadi pemasok penting bagi pemenuhan beberapa sumber pangan seperti protein. Analisis pada 50 negara dunia menunjukkan bahwa pada negara dengan pendapatan yang semakin rendah, proporsi pengeluaran untuk pangan (*food*) semakin tinggi dengan karakteristik elastisitas pendapatan yang semakin kurang elastis. Kegagalan untuk mempertahankan atau meningkatkan produksi sektor pertanian, akan berimplikasi serius pada kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat secara luas. Pada negara-negara penghasil tinggi, kondisi ini dapat diatasi dengan impor bahan pangan. Tetapi bagi negara dengan penghasil terbatas seperti Indonesia, impor bahan pangan menjadi pilihan yang sangat sulit karena terbatasnya kemampuan impor.

Krisis Finansial Global 2008

Pada tanggal 8 Oktober 2008 terjadi kepanikan di pasar modal USA, dalam dua hari Wall Street kehilangan ribuan triliun rupiah akibat runtuhnya harga saham diikuti berbagai negara lain (Tabel 1.1). Sebenarnya malapetaka di Wall Street sudah diindikasikan sejak 2005 dimana telah terjadi krisis kredit perumahan yang kurang layak (*sub-prime*). Pada waktu itu terhitung 14.000 triliun rupiah menguap, dimana salah satu bank ternama Lehman Brother merugi 600 triliun rupiah. Namun, keterbatasan pengetahuan akan gejala krisis tersebut, membuat Bank Central USA (the FED) pada April 2008 menyatakan gejala tersebut sudah reda.

Menurut Wen Jiabao, Perdana Menteri China pada pertemuan WEF di Davos bulan Februari 2009, telah terjadi kegagalan supervisi dan regulasi di sektor keuangan untuk mendampingi percepatan inovasi finansial yang ekspansif dan beresiko tinggi serta meluas. Akibatnya pada saat meletusnya krisis finansial global di awal Oktober 2008, banyak korban berjatuhan. Salah satunya, Lehman dinyatakan bankrut pada tanggal 17 Oktober 2008. Nilai sahamnya yang pada tahun 2007 sebesar 67.73\$ anjlok menjadi 0.22\$. Pemerintah USA akhirnya harus

merogoh kocek sebesar 7000 triliun rupiah untuk mencegah keruntuhan institusi finansialnya, termasuk perusahaan asuransi terbesar AIG disuntik dana 850 triliun rupiah yang sampai Maret 2009 tetap bermasalah.

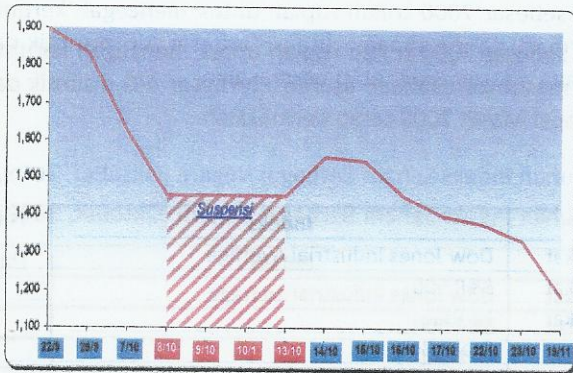
Tabel 1.1. Kejatuhan Indeks Saham Berbagai Negara (Oktober, 2008)

No	Negara	Indeks	Tingkat Penurunan
1	Amerika Serikat	Dow Jones Industrial Average	-35,32
2	Amerika Serikat	S&P 500	-38,03
3	Amerika Serikat	Nasdaq	-37,97
4	Brasil	Brazil Bovespa	-41,96
5	Inggris	FTSE 100	-33,19
6	Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	-47,13
7	Jepang	Nikkei 225	-45,93
8	Hongkong	Hang Seng	-46,61
9	Singapura	Straits Times	-43,40
10	Malaysia	Kuala Lumpur Composite Index	-34,91
11	Vietnam	VN Index	-59,11
12	China	Shanghai	-62,07

Sumber: Bloomberg

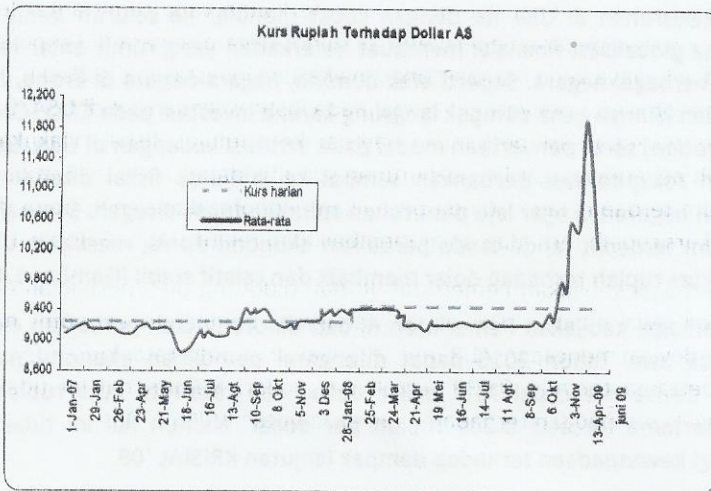
Ternyata kekisruhan di USA itu dengan cepat menular ke seluruh dunia (Tabel 1.1), karena globalisasi finansial membuat keterkaitan yang rumit antar lembaga keuangan berbagai negara. Seperti efek domino, negara-negara di Eropa, Jepang, Australia dan lainnya kena dampak langsung karena investasi pada CDO (*Collateral Debt Obligation*) serta penyertaan modal pada institusi keuangan di USA. Berbagai upaya dari rekapitalisasi perbankan sampai ke stimulus fiskal dilakukan oleh pemerintah negaranya agar laju penurunan spiraltik dapat dicegah. Sampai Maret 2009, belum terdapat tanda-tanda perbaikan ekonomi dunia, meskipun di bulan Juni 2009 kurs rupiah terhadap dolar membaik dan relatif stabil (Gambar 1.4).

Dengan berbagai kebijakan Pemerintah RI dan didorong oleh perbaikan ekonomi dunia, pada awal tahun 2016 dapat ditengarai pemulihan ekonomi nasional. Cadangan devisa mencapai 71,8 miliar dollar dan rata-rata kurs rupiah pada triwulan pertama tercatat 9.239 rupiah per dollar. Namun hal ini tidak boleh mengurangi kewaspadaan terhadap dampak lanjutan KRISIAL '08.



Gambar 1.4. Grafik Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia (September-November 2008)

Di Indonesia, kehancuran pasar saham terjadi pada tanggal 24 Oktober 2008, dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia Turun drastis dimana pada awal Januari 2008 nilai IHSG sebesar 2731 anjlok sebesar -51.04% menjadi 1337. Bahkan untuk menahan laju spiraltik ke bawah harga saham karena ulah para spekulan yang berlomba menjual dengan harga murah, otoritas BEI telah menutup perdagangan di bursa dari tanggal 8-13 Oktober 2009 (suspensi).



Gambar 1.4. Kurs Rupiah terhadap dolar AS

Bulan Maret 2009, IHSG belum bergerak banyak masih berkisar di 1360 dengan kurs dollar menembus Rp. 12.000. Di USA sendiri belum membaik, sebagai contoh AIG disuntik lagi 1500 triliun rupiah dan 320 triliun rupiah, dan masih merugi 993 triliun rupiah. Apakah artinya ini? Secara jelas ratusan ribu triliun rupiah dana mengalir dari kas pemerintah USA, yang nota bene uang rakyat, terpaksa digunakan untuk menyetatkan sektor finansial tanpa membuahkan hasil yang cepat dan efektif. Sampai bulan Juni 2009, sudah 200 bank regional yang skala kecil dilikuidasi dan pengangguran sudah meningkat menjadi 9.5%.

Kerusakan lembaga finansial dunia berlanjut merambah ke berbagai sektor. Dampak sosial mulai bermunculan, dengan meningkatnya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan macetnya produksi di sektor rill dan melemahnya permintaan atas produk akibat daya beli yang turun serta meningkatnya kredit bermasalah.



Gambar 1.5. Penurunan Ekspor Nonmigas Indonesia

Titik kulminasi dari kekacauan global tersebut adalah menurunnya perdagangan antar negara yang dikarenakan macetnya kredit (*credit crunch*) untuk menunjang perdagangan impor-ekspor. Akibatnya, krisis global sudah bermutasi menjadi krisis finansial dan perdagangan. Negara yang berorientasi ekspor seperti Singapura sudah diprediksi tumbuh negatif, dan di Indonesia pun berbagai eksportir hasil ikan, agroindustri dan kerajinan sudah mulai turun kapasitasnya.

Tabel 1.2. Perkembangan Ekonomi Indonesia

Indikator	Triwulan I 2008	Triwulan IV 2008	Triwulan I 2009
Konsumsi rumah tangga	5,5	6,4	4,3-5
Belanja Pemerintah	3,6	16,4	8-13,1
Investasi	13,7	9,1	5-6,5
Ekspor	13,6	1,8	-6-(-9)
Impor	18	-3,5	-8-(-12)
Pertumbuhan ekonomi	6,2	5,2	4,3-4,8

Sumber : Departemen Keuangan 8 April 2009

Belum habis dampak krisis multi dimensi berlangsung, berbagai pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan oleh lapisan atas masyarakat, kembali dikejutkan oleh krisis keuangan global pada penghujung 2008. Dampak krisis keuangan ini berbeda dengan krisis keuangan sebelumnya. Pakar manajemen barkaliber dunia, Peter Drucker, menyebutkan bahwa krisis ini terjadi akibat gejala ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil, yakni fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa. Fenomena ketidakseimbangan itu dipicu oleh maraknya kegiatan bisnis spekulatif, sehingga dunia terjankit penyakit yang bernama ekonomi balon (*bubble economy*). Dijelaskannya, perkembangan "kredit derivatif", sebagai instrumen keuangan merupakan pemicu kerusakan dan krisis ekonomi global. Merujuk data Morgan Stanley, nilai kredit derivatif pada tahun 1998 yang hanya Rp 500 trilyun, namun pada Desember 2002 ditaksir sudah mencapai Rp 24.000 trilyun, suatu kenaikan yang luar biasa, yakni sebesar 47.000 persen atau 4700 kali lipat, dalam empat tahun. Transaksi derivatif ini adalah transaksi "maya" (semu) yang dikaitkan dengan aktiva keuangan.

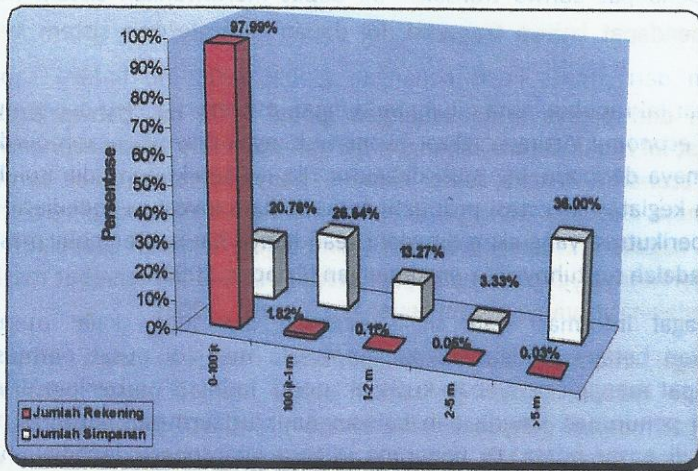
Demikian pula transaksi "*future trading*" merupakan spekulasi tentang kejadian di masa yang akan datang, juga sangat laris dipraktekkan dalam bisnis modern. Akhirnya, perekonomian dunia digelembungkan oleh transaksi maya tersebut dilakukan oleh segelintir orang di beberapa kota dunia, seperti London (27%), Tokyo, Hongkong, Singapura (25 %) dan Chicago-New York (17%). Transaksi maya ini, mencapai 99 persen dibanding transaksi riil. Saat ini bank dan lembaga keuangan sering kali menciptakan berbagai model transaksi derivatif yang dikaitkan dengan fluktuasi ekonomi global, misalnya kenalkan bunga atau resiko obligasi tidak dibayar yang dapat dijual kepada investor. Untuk resiko kredit tidak dibayar disebut dengan *credit swap*. Kini, dengan banyaknya kritik yang dialamatkan kepada praktek ini dan dampak negatifnya, banyak pakar ekonomi

dunia berpendapat bahwa transaksi ini dapat meruntuhkan sistem keuangan global.

Kesimpulan dari proses krisis keuangan global 2008 ini, bahwa kapitalisme modern saat ini rapuh karena dibangun dengan *monetary based economy* bukan *real based economy*. Artinya, sektor ekonomi banyak dikembangkan berdasarkan transaksi maya daripada investasi di sektor riil. Rente ekonomi diperoleh bukan melakukan kegiatan investasi produktif tetapi dalam investasi spekulatif. Bahaya potensial berikutnya yang akan dihadapi seandainya hal-hal tersebut masih terus dilakukan adalah runtuhnya sistem keuangan (Cooper, 2008).

Dari berbagai informasi baik skala nasional dan juga skala internasional menunjukkan betapa industri perbankan selalu menjadi pusat permasalahan, bahkan dapat menjadi penyebab krisis ekonomi. Industri perbankan di Amerika mengalami penurunan kinerja dan bahkan bankrut termasuk jatuhnya prestasi sahamnya di pasar bursa. Di beberapa negara lain seperti Jepang, China dan Jerman industri keuangan semakin mengkhawatirkan. Di Indonesia, dampak buruk kepincangan sektor keuangan dan sektor riil sebenarnya sudah terlihat sejak 1967 yang sangat berorientasi pada sektor keuangan. Pada awalnya terjadi percepatan gerakan ekonomi Indonesia dengan kemunculan berbagai bank baru dan membawa peluang terbukanya secara luas tenaga kerja berpendidikan tinggi. Tetapi perkembangan tersebut kemudian menggiring kepada tingginya hutang pemerintah yang berkepanjangan sampai saat ini.

Krisis perbankan 1997 telah melahirkan krisis keuangan dan ekonomi yang berkepanjangan. Krisis perbankan waktu itu ditanggulangi dengan pembentukan BPPN serta berbagai upaya merger, akuisisi dan lain sebagainya. Paling tidak Rp. 650 triliun uang APBN terpaksa dijadikan "bailout" untuk menyelamatkan perbankan. Dalam konteks krisis ekonomi terbaru ini, sejumlah permasalahan mendasar akibat akumulasi kesalahan kebijakan ekonomi yang menganut paham neoliberalisme selama ini oleh krisis ketenagakerjaan yang makin akut. Proses tersebut mendorong kemiskinan struktural yang parah, akhirnya mendorong ketimpangan distribusi pendapatan, ketimpangan pembangunan antar daerah, konsentrasi kepemilikan aset produktif di tangan konglomerat, beban utang luar negeri dan intervensi pasar saham oleh pemodal asing. Pada Gambar 1.7, dapat dilihat jumlah rekening (jumlah orang) berbanding dengan jumlah simpanan, ternyata hanya 0.03% penabung yang mempunyai simpanan di atas 5 milyar dan sebanyak 97.99% penabung mempunyai simpanan 0-100 juta. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang luar biasa.

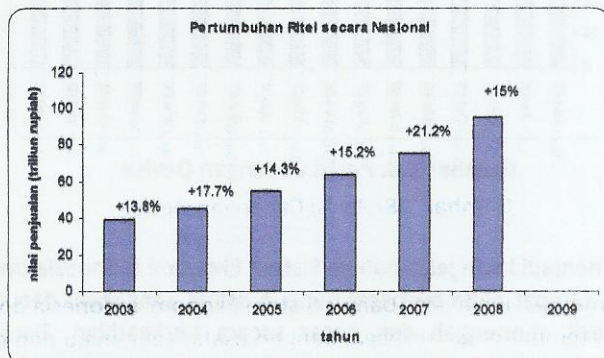


Gambar 1.6. Dana Pihak Ketiga di Perbankan (2008)

Kini saatnya untuk mengubah strategi dan melakukan orientasi pengembangan ekonomi dengan pemikiran dan cara-cara baru. Oleh karena itu, semua pihak, sesuai dengan peran masing-masing dapat mendorong investasi berbagai kegiatan bisnis sektor riil. Kegiatan sektor riil yang bisa dikembangkan cukup banyak antara lain, sektor agribisnis, perikanan, konveksi, pabrik segala kebutuhan hidup keseharian, seperti susu, sabun, shampo dan ratusan jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lainnya. Dalam mengembangkan sektor riil ini, diperlukan kordinasi yang efektif dengan semua pihak yang terkait terutama di perdagangan ritel, seperti perbankan, pedanggung ritel, pengusaha produsen dan masyarakat.

Apabila di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, penanggulangan krisis adalah membuka peluang bekerja secara besar-besaran, maka negara kita dapat melakukan dengan arah yang sama tetapi dengan mengutamakan penguatan UMK. Di dalam konteks ini, lembaga keuangan, seyogianya dapat memberikan banyak manfaat dalam mendukung pengembangan sektor sektor riil, terutama agribisnis/agroindustri dan UMKM yang fleksibel, lebih kompetitif, transparan, profesional, dan bersifat universal. Di s lain, proses itu sekaligus perlu diarahkan untuk melakukan pengembangan dan perbaikan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia dan pola pengelolaan potensi sumberdaya dan ekonomi lokal didalam suatu sistem yang menggerakkan dan memperbaiki sektor

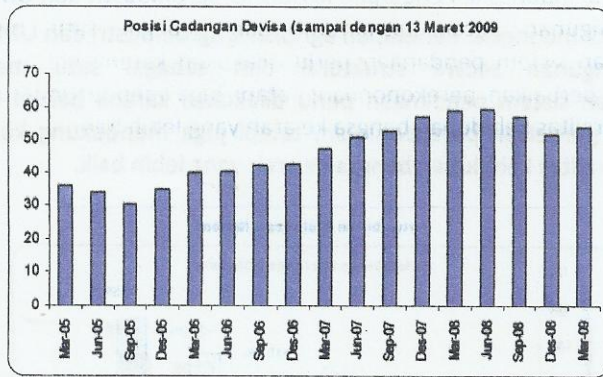
perekonomian di Indonesia. Penetapan agribisnis/agroindustri dan UMKM sebagai dasar pembangunan secara struktural dan sebagai satu media untuk mengembangkan sistem pendanaan perlu dilakukan karena hal ini tidak hanya akan memacu perbaikan perekonomian, tetapi juga mendukung kondisi sosial, politik, dan moralitas kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik.



Gambar 1.7. Pertumbuhan Ritel Secara Nasional

Pada bulan Juni 2009, telah terjadi angin segar dengan indikator makro ekonomi yang mulai membaik (lihat Gambar 1.8 dan 1.9). Akan tetapi, harus tetap diwaspadai dampak sampingannya ke sektor pertanian dan wilayah pedesaan, dimana terdapat jutaan usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat miskin. Para petani dan nelayan yang menjadi pelaku ekonomi akar rumput (*grass root*) memerlukan uluran tangan dalam pengembangan kapasitasnya di taraf lokal.

Pengembangan sektor riil melalui pemberdayaan UMK menjadi sebuah sistem penggalan nilai etik dan moral untuk pengembangan kelembagaan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Proses itu juga perlu sejalan dengan pengembangan landasan etik dan moral bagi legislator dan penyelenggara pemerintahan. Pengembangan UMKM tidak saja menjadikan pelakunya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga beretika dan menjunjung tinggi norma mencari kebaikan untuk semua orang. Dasar hubungan antara individu dalam transaksi selalu ditujukan atas dasar kerelaan dan untuk kebaikan semua.



Gambar 1.8. Posisi Cadangan Devisa

Pada akhirnya menjadi lebih jelas bahwa Sistem Ekonomi Indonesia domestik akan dapat memberi tempat pada berbagai bangun usaha yang maju dan modern baik skala mikro, kecil, menengah dan besar secara berkeadilan. Dengan strategi ekonomi domestik tersebut, maka upaya penanggulangan dampak Krisial 2008 dapat disusun secara komprehensif dan sistematis melalui kebijakan publik yang lebih berpihak pada rakyat.



Gambar 1.9. Pergerakan Indeks Saham BEI, Jakarta

Strategi Penanggulangan Krisis Ekonomi

Sejak reformasi dicanangkan, guna mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari hantaman krisis moneter tahun 1997, maka kebijakan di bidang perekonomian dipengaruhi ketidakpastian arah dan fokus prioritas, karena kompleksitas persoalan serta dinamika dari parameter-parameternya. Dalam proses pencarian solusi, tidak terelakkan merebaknya konflik pemikiran baik dari para pengambil kebijakan maupun para pakar yang mendampinginya. Konflik pemikiran mendorong tatanan perekonomian menjadi abu-abu, kurang jelas strateginya, ambivalen, sulit dipahami masyarakat jelata, membingungkan pelaku ekonomi sehingga memberi peluang bagi para petualang ekonomi untuk memperkaya diri dan kelompoknya (*white collar crimes*).

Saat ini pembangunan perekonomian Indonesia sudah menunjukkan perbaikan namun masih seperti lokomotif yang berlari kencang didalam badai yang belum juga berlalu. Situasi ini sangat memprihatinkan sebab kemungkinan bisa terjerumus ke jurang kehancuran makin tinggi. Oleh karena itu sebaiknya warna perekonomian yang abu-abu didefinisikan dan disusun strukturnya agar tidak menjadi kabut yang mempengaruhi kejernihan berfikir para pengambil keputusan. Kalau memang warnanya abu-abu, berarti tidak campuran hitam dan putih, harus mempunyai karakter khusus sehingga setiap pihak mengerti memang warna itu abu-abu.

Strategi pembangunan yang diterapkan untuk memulihkan perekonomian nasional sejak masa krisis, ternyata belum menunjukkan hasil yang diharapkan kita semua. Adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi kaum intelektual secara bersama-sama mengembangkan alternatif kebijakan dalam pembangunan ekonomi sehingga tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan persatuan bangsa dicapai secara efektif. Pemikiran bersama tersebut perlu secara ilmiah diproses sehingga dirumuskan suatu konsep Strategi Perekonomian Nasional (SPN). Proses ilmiah ini adalah berupa kaji tindak dengan pendekatan *Expert Survey* dimana responden terpilih adalah para pakar lintas disiplin dari berbagai kampus. Metoda kesisteman dengan mengakomodasikan teknik *soft-computing* mencoba untuk membangun sistem renovasi (*dai-mai*; bahasa Vietnam) perekonomian nasional yang memang berkarakter abu-abu.

Agar supaya konsep SPN dapat diwujudkan secara kongkrit dan dapat diimplementasikan secara efektif, diterapkan suatu metodologi yang dapat menstrukturkan SPN sehingga pengaturan dan hubungan/keterkaitan antar elemen dan sub-elemen dalam sistem SPN terdefinisi secara kongkrit dan jelas. *Interpretative Structural Modelling* (ISM) merupakan salah satu metodologi dalam Ilmu Sistem yang telah dikembangkan untuk tujuan strukturalisasi sistem tersebut.

Sesuai dengan metode dan kemampuan analisis, penerapan ISM dalam rangka strukturisasi sistem SPN bertujuan untuk:

- Menghasilkan diagram struktur hirarki dari elemen dan sub-elemen.
- Mengidentifikasi elemen kunci (*key element*) dari setiap elemen.
- Mengidentifikasi karakteristik sub-elemen berdasarkan tingkat *dependency* (ketergantungan) dan tingkat *driver power* (daya penggerak).

Hasil dan pencapaian ketiga tujuan tersebut adalah diperolehnya struktur yang jelas dari SPN, serta informasi yang lengkap untuk merumuskan program SPN dalam rangka perbaikan teori dan strategi pembangunan ekonomi nasional.

Setelah itu, ditindaklanjuti dengan pentahapan prioritas pembangunan melalui perumusan konsensus pakar dengan metode Analisa Jenjang Keputusan (AHP) serta *Exponential Comparison Method*. Seringkali perencanaan pembangunan gagal diimplementasikan karena penetapan prioritas yang tidak komprehensif dan hanya berdasarkan analisa kecenderungan (*forecasting*) dari data runtun waktu.

Dari berbagai teknik analisa kebijakan publik tersebut masih pula diperkaya dengan masukan langsung (*direct inputs*) melalui *Focus Group Discussion (FGD)* serta konsultasi ahli. Kesemua rumusan itu kemudian dirujuk pada berbagai studi pustaka dan kemudian dimusyawarahkan pada semiloka ilmiah. Penulisan naskah kemudian dipertajam oleh para ahli dan diuji-sahkan ke khalayak guna mendapatkan masukan operasionalisasi.

Sistem perekonomian suatu negara merupakan sistem yang kompleks dan dinamis yang perlu dipandang dari berbagai segi serta dikaji secara komprehensif. Pemilihan metodologi riset harus lebih memperhatikan pencapaian tujuan, mempertimbangkan semua *stakeholders* dan penekanan pada efektifitas kajian. Untuk itu pendekatan sistem (*system approach*) sesuai dengan studi kebijakan ini.

Eksplorasi pemikiran dari berbagai komponen bangsa yang utamanya cerdik cendekia dari lingkungan kampus dan praktisi berwawasan luas menjadi sumber kepakaran utama dalam pelaksanaan kajian ini. Pelaksanaan kajian akademik dibagi menjadi 4 (empat) tahapan utama, yaitu:

- Identifikasi dan strukturisasi SPN
- Penentuan prioritas strategi SPN
- Penentuan prioritas sektoral dalam SPN
- Semiloka SPN untuk validasi dan pencapaian konsensus.

Masing-masing tahap dilaksanakan secara seksama dengan perumusan kuisisioner yang matang serta dengan pengumpulan informasi dan pengetahuan dari pakar multidisiplin, baik melalui *focus group discussion* ataupun melalui pengisian langsung oleh para individu nara sumber.

Survei tahap pertama pada tahun 2004 dengan menggunakan teknik ISM (*Interpretive Structural Modelling*) mengkaji elemen dan hirarki struktur SPN. Masing-masing elemen tersusun dari sebelas sub-elemen. Dasar dari penyusunan sub-elemen sistem RPN dikembangkan dari dua sumber pengetahuan, yaitu: (1) *Focus group discussion* yang diperkaya oleh masukan eksternal *reviewer* dari panel ahli (*expert panelist*). Para *principal investigator* bertindak sebagai inisiator dalam merumuskan draft awal yang kemudian diverifikasi oleh *primary researcher*. (2) Referensi kuat yang relevan.

Hasil identifikasi dan strukturisasi elemen, menjadi acuan dalam pendalamannya melalui survei tahap 2 yang secara spesifik bertujuan:

- Merumuskan prioritas program pembangunan jangka menengah.
- Merumuskan struktur hirarki dan penetapan prioritas manajemen krisis: finansial dan penanggulangan ledakan pengangguran.

Teknik yang dipakai pada perumusan prioritas program pembangunan adalah pengurutan berdasarkan prioritas. Teknik AHP (*Analytic Hierarchy Process*) digunakan untuk perumusan struktur hirarki dan penetapan prioritas manajemen krisis finansial dan penanggulangan ledakan pengangguran.

Hasil strukturisasi elemen dan prioritas serta hirarki sistem lebih lanjut dijabarkan dalam penentuan prioritas sektoral dan isu strategis melalui survei tahap 3 yang secara spesifik bertujuan:

- Merangkum interpretasi pendapat pakar lintas disiplin lintas kampus dalam menerapkan prioritas sektoral yang masuk dalam titik berat pembangunan bangsa.
- Merumuskan buah pemikiran pakar yang spesialisasi pada sektor keahliannya secara deskriptif untuk naskah cerdas dari strategi ekonomi domestik.

Metode survei yang diaplikasikan adalah teknik *Exponential Comparison Method* (ECM) dimana para responden menyampaikan pendapatnya melalui skala ordinal pada konteks elemen **Tingkat Kritikalitas** dan **Tingkat Keterkaitan**. Untuk melengkapi informasi maka para responden diminta menulis esai singkat dan padat tentang perihal sektor yang ditekuni dan atau bidang keahliannya berada.

Bidang yang dikaji meliputi: Politik, Ekonomi, Pertahanan Keamanan dan Sosial. Teknik *Exponential Comparison Method (ECM)* cukup sederhana, mengisinya pun mudah dan cepat, namun memerlukan pemahaman, perenungan serta pemikiran yang mendalam sebelum menerapkan nilai skala yang akan ditulis pada matriksnya.

Analisis kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan secara konsensus banyak mengandung faktor ketidakpastian, *inconsistency* dan keragaman yang kompleks. Oleh karena itu, metodologi riset ini menggunakan beberapa tahap dari *Decision Theory* dengan aplikasi *Fuzzy AHP Process Modelling* sebagai pengolahan basis pengetahuan yang dilisitasi dari para nara sumber.

Teori ekonomi pasar bebas yang mendasari kebijakan ekonomi Indonesia dikemukakan oleh Adam Smith (1723-1790) yang dikenal sebagai sistem kapitalisme yang terdesentralisasi karena negara (atau pemerintah) sama sekali "tidak boleh" mengaturnya. Sesungguhnya dalam kenyataan masalahnya bukan antara peran pemerintah dan mekanisme pasar, melainkan seringkali pilihan antara kegiatan aparat pemerintah atau birokrasi dengan mekanisme pasar. Kalau memang demikian halnya, maka di lapangan mudah terjadi konflik di sektor riil antara birokrat dengan pengusaha, dan di sektor finansial antara pemerintah dengan perbankan, misalnya di persoalan penjaminan kredit usaha.

Azas kekeluargaan yang menjadi dasar sistem ekonomi nasional, dalam kenyataan saat ini cenderung digantikan azas persaingan bebas, sebagaimana penerapan teori ekonomi neo-klasik, yang berujung pada liberalisasi finansial dengan asumsi adanya kondisi ekonomi tertekan atau situasi krisis.

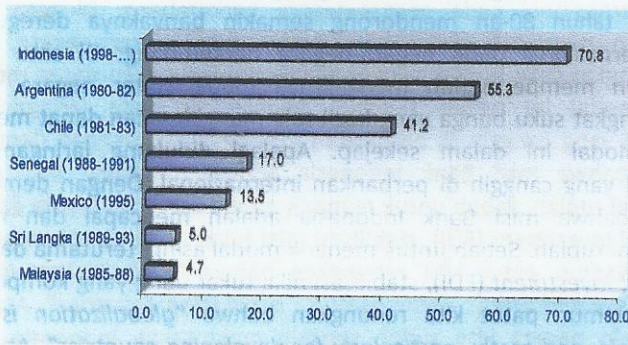
Mungkin kita bisa mencoba memahami pendapat Mubyarto (2000) bahwa sistem ekonomi yang kita jalankan sekarang sangat kecil kemungkinannya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan masih tingginya praktek korupsi dan lemahnya penanganan hukum bagi "*white collar crime*", maka mesti dipikirkan renovasi sistem ekonomi yang *strategic-fit*, yaitu kebijakan publik yang "*pas*" dengan ke-Indonesia-an.

Upaya penanggulangan kemiskinan misalnya, masih perlu dikoreksi secara mendasar pada tatanan teori pembangunan. Menurut Kwik Kian Gie (2002), kelemahan upaya tersebut antara lain kebijakan pembangunan hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan memandang kemiskinan fokus pada aspek ekonomi saja. Oleh karena itu perlu dianalisa isu strategis guna menemukan arah teori ekonomi yang "*pas*" sesuai UUD 1945 pasal 27.

Ada beberapa isu strategis: Kecenderungan globalisasi yang diperkenalkan Roland Robertson di tahun 80-an mendorong semakin banyaknya deregulasi untuk investasi internasional pada negara-negara berkembang. Di satu sisi, upaya tersebut akan mempermudah mengalirnya modal antar negara. Perubahan perbedaan tingkat suku bunga yang kecil saja mungkin akan dapat menyebabkan pindahnya modal ini dalam sekejap. Apalagi didukung jaringan Teknologi Informasi (IT) yang canggih di perbankan internasional. Dengan demikian dapat dimengerti, bahwa misi Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sebab untuk menarik modal asing, terutama dalam bentuk *Foreign Direct Investment (FDI)*, stabilisasi nilai tukar uang yang kompetitif sangat diperlukan. Namun patut kita renungkan bahwa "*globalization is inherently dangerous, risky and costly, particularly for developing countries*". Atau memang para pemimpin negara kita sudah sengaja melepaskan Indonesia dari status negara berkembang?

Modal asing memiliki dua sisi yang perlu dipertimbangkan. Dari satu segi, modal asing memang dapat mengatasi kekurangan modal domestik yang diperlukan untuk membangun prasarana dan investasi, yang menyangkut percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun di lain pihak, modal asing (baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman perbankan) dapat mendorong inflasi dan mengapresiasi nilai tukar mata uang negara yang dimasukinya. Menurut UNDP ternyata 5 Negara terkaya di dunia menikmati 82 % dari peningkatan ekspor dan 68 % *Foreign Direct Investment (FDI)*. Oleh karena itu Bappenas menegaskan pemulihan sektor perbankan di Krismon '97 sangat penting untuk menggerakkan kembali kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing global. Biaya fiskal yang harus dikeluarkan pemerintah melalui APBN, untuk merestrukturisasikan perbankan sangat besar (Gambar 1.11). Pada Krismon '97 telah dikeluarkan anggaran pemerintah sebesar 648,7 triliun dimana kinerja BPPN dalam *recovery rate* hanya 28 %. Dengan pengorbanan rakyat yang amat besar itu, apakah krisis keuangan telah berakhir?

Definisi krisis keuangan adalah bilamana pasar keuangan tidak dapat menyalurkan dana secara efisien kepada pihak yang memiliki peluang investasi yang paling produktif. Apabila kita mengamati praktek pembiayaan usaha produktif, dan masih lemahnya intermediasi perbankan, boleh jadi krisis keuangan secara de facto belum selesai. Bisa jadi kalau terkena gejolak eksternal dari luar negeri, stabilitas sistem keuangan yang rentan ini akan runtuh lagi dan kembali banyak bank bangkrut dan kembali pemerintah membayar penjaminan simpanan. Kalau ada rekap perbankan jilid II (dua), maukah dan mampukah rakyat membayarnya?



Gambar 1.10. Biaya Fiskal untuk Menanggulangi Krisis Perbankan (Juta US \$)

Beban hutang luar negeri di tahun 2004 mencapai US\$ 83,5 milyar dan dalam negeri sekitar 616 triliun rupiah, sedangkan pada Juli 2009, total hutang pemerintah naik menjadi 1585 triliun rupiah sangat mencekik leher pemerintah. Menurut C. Herinowo (2002), berdasarkan berbagai asumsi yang realistis, rasio utang Indonesia terhadap PDB akan menurun secara pasti suatu tingkat utang yang mengarah ke tingkat yang lebih "sustainable" (terjemahan: berkelanjutan). Suatu hal yang sangat penting yang dapat mempercepat proses pencapaian tingkat sustainabilitas utang tersebut adalah nilai tukar rupiah yang stabil, dan tingkat suku bunga yang rendah.

Kedua upaya tersebut telah dikerjakan BI sebagai otoritas moneter dengan baik. Nilai tukar rupiah relatif lebih stabil di tahun 2004 dibawah Rp 9000 per US Dollar, dan tingkat SBI satu bulan sudah dibawah 8 %. Dengan perkataan lain, sekitar tahun 2005-2006, diperkirakan rasio utang berkelanjutan dapat kurang dari 60 % dari PDB. Permasalahannya, apakah utang berkelanjutan tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kalau tidak hanya mengulang pendekatan masa lalu, pertumbuhan ekonomi hanya ditopang oleh struktur perekonomian yang rapuh.

Mungkin jawaban lain untuk pembayaran utang pemerintah adalah privatisasi BUMN, melanjutkan privatisasi yang tidak transparan merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan bisa merugikan negara. Bahkan tanpa informasi yang baik, transparansi dan sanksi yang jelas maka proses privatisasi malah akan membebani anggaran pemerintah lebih besar lagi di masa mendatang.

Dana pihak ketiga di perbankan saat itu lebih dari 800 triliun rupiah dimana 130 triliun rupiah berada di SBI. Pada tahun 2004 perbankan kelebihan likuiditas mencapai 460,9 triliun rupiah atau sekitar 52 % dari total dana pihak ketiga. Hal ini berarti fungsi intermediasi perbankan belum berjalan optimal, khususnya ke sektor produksi, sehingga muncul kekhawatiran terjadinya *credit crunch*, akibat menurunnya keamanan bank menyalurkan kredit ke dunia usaha.

Sudah saatnya ditemukannya suatu sistem ekonomi nasional yang mengedepankan kepentingan nasional di saat kritis dengan tetap memelihara kondisi dan mekanisme pasar berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Pasar yang manusiawi (*human market*) diperkenalkan definisinya pada Copenhagen Seminar oleh ASEM (1999) dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- *Markets are humane if they allow full and significant economic participation.*
- *Markets are humane if they provide people with a fair reward for their economic activity and if there is no exploitation or excessively skewed income and wealth distribution.*
- *Markets are humane if they are ruled by ethical principles, if competition is fair and contracts are respected.*
- *Markets are humane if they do not allow the search for profit and the pursuit of self-interest to "monetize" and impoverish social relation.*

Instead of market societies, we need societies based on a culture of solidarity. Solidarity among groups and social classes. Solidarity with future generations by preserving the environment and solidarity among nations in the quest for a just and equitable economic world order.

Dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan berbagai pakar lintas disiplin dan antar kampus telah ditemukannya tiga masalah nasional yang bisa mengundang terjadinya krisis nasional. Tiga permasalahan tersebut adalah 1) akumulasi pengangguran massal dan tenaga kerja terdidik, 2) krisis perbankan jilid dua yang akan menyedot APBN ratusan triliun rupiah lagi untuk upaya penyehatan dan ongkos likuidasinya, dan 3) masalah energi dan minyak yang fluktuatif harganya. Oleh karena itu diperlukan strategi nasional yang handal dalam mengantisipasi terjadinya krisis sehingga mampu mengurangi dampak dan bahkan mengeliminasi pada saat gejala-gejala baru muncul.

SPN disusun berlandaskan *Domestic Economy Strategy* sebagai upaya cerdas dan bermoral agar Republik Indonesia segera keluar dari krisis berkepanjangan ini. Penyusunan strategis penanggulangan krisis ekonomi dilakukan melalui tahap

identifikasi sistem yang diawali dengan penjabaran struktur, pengenalan elemen kunci, penentuan daya penggerak sampai dengan penetapan prioritas program.

Sistem Perekonomian Domestik memiliki kendala utama yang dihadapi yaitu ketidakpastian nilai tukar uang (kurs mengambang). Dalam konteks hubungan sebagai akibat, kendala ini merupakan pendorong utama timbulnya kendala lain yang dihadapi dalam renovasi perekonomian. Kendala kedua yaitu lemahnya koordinasi piranti kebijakan publik dalam perihal cadangan devisa, suku bunga, fiskal dan deregulasi.

Prioritas strategi pembangunan jangka menengah adalah pemberantasan KKN dan penegakan hukum. Untukantisipasi manajemen krisis finansial jilid dua yang menjadi prioritas strateginya yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat dan sektor riil. Tujuan utama yaitu ketahanan ekonomi nasional, dan prioritas faktornya yaitu penegakan hukum. Upaya penanggulangan ledakan pengangguran diperlukan strategi pemberdayaan usaha mikro dan usaha kecil, agar terjadi dengan faktor utama yang perlu diperhatikan adalah pendidikan dan keterampilan kerja.

Hasil survei pakar mencerminkan bahwa bidang ekonomi merupakan prioritas utama pembangunan yang diikuti dengan bidang sosial, politik dan hankam. Pada bidang ekonomi, prioritas pertama pada keuangan negara (APBN) diikuti dengan tata pemerintahan (*governance*) serta ketahanan pangan dan gizi. Pada bidang sosial, prioritas pertama pada pangan dan gizi, kedua pada usaha kecil/menengah dan ketiga usaha mikro/sector informal.

Hasil diskusi pakar pada semiloka SPN pada tahun 2004 dapat disimpulkan tiga konsensus, yaitu:

- **Keprihatinan** atau kemungkinan terjadinya krisis ekonomi jilid dua yang dipicu oleh krisis finansial global, lonjakan harga energi, bencana alam serta meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
- **Kepercayaan** atas masa depan yang lebih baik mengingat masih tersedianya sumber daya alam dan sosial yang mempunyai keunggulan komparatif dan didukung oleh modal intelektual yang kompetitif.
- **Kepentingan** untuk melaksanakan renovasi pembangunan, termasuk menerapkan teori ekonomi alternatif yang melandasi pedoman kebijakan publik agar sejalan dengan amanah UUD 1945.

Berdasarkan perihal tersebut dan dasar-dasar pemikirannya maka kemudian dapat perlu dikembangkan kebijakan publik untuk **Sistem Ekonomi Domestik** yang

terfokus pada upaya pemulihan ekonomi dari krisis finansial global dan pemantapan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sistem Ekonomi Domestik

Terminologi sistem amat tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Pada umumnya, istilah Sistem merupakan kesepadanan kata dari prosedur, tatanan dan atau mekanisme kerja. Interpretasi ini dapat dimaklumi, sebagaimana statistik selalu disosialisasikan dengan data. Sebenarnya Sistem menurut Ilmu sistem, adalah suatu gugus elemen yang saling berkaitan serta terorganisasi untuk mencapai suatu gugus tujuan.

Konsepsi Sistem Ekonomi Domestik yang diangkat dari berbagai penelitian para pakar lintas disiplin diulas sebagai sumbang fikir atas strategi kebijakan yang komprehensif melalui pendekatan sistem. Mengapa harus dengan pendekatan sistem? karena ekonomi nasional secara alami bersifat kompleks dan dinamis. Apabila ditinjau dari disiplin ilmu apapun, pasti tergambar proyeksi parsial yang spesifik meskipun mengandung citra yang sama.

Mungkin perencana yang tangguh mencoba menyusun kepingan-kepingan analisis menjadi mozak yang utuh. Tapi pasti tidak mudah, dan bisa jadi yang didapat adalah "puzzle" dengan ribuan keping. Ilmu sistem sebenarnya adalah ilmu merangka (sintesa).

Dalam kajian ini digunakan teknik sistem dan sengaja belum memanfaatkan rasionalisasi formula matematik. Hal ini didasari pada studi empiris pada saat simulasi menurunkan parameter makro (misal: inflasi) ke parameter mikro (misal: Neraca Rugi Laba), ternyata ditemukan persamaan diferensial parsial orde dua (diturunkan pada waktu dan ruang) yang hampir tidak mungkin diselesaikan secara analitik. Selain itu juga pernah dijumpai kebuntuan (*dead-lock*) ketika mencoba mencari formula untuk menghubungkan angka kecepatan pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi produksi satu perusahaan agribisnis.

Tanpa mengurangi kepentingan pengkajian numerik untuk perencanaan pembangunan, maka telaah deskriptif dilakukan sebagai upaya menemukannya Sistem Ekonomi Domestik. Dalam hal ini sangat penting untuk menetapkan adanya perbedaan yang jelas antara suatu metodologi yang berorientasi pada pengumpulan dan pengujian data, dengan suatu metodologi yang secara filosofis berkenan untuk memberikan pedoman guna bertindak (*action oriented*). Metodologikedua utamanya memperhatikan upaya menyilapkan informasi yang relevan pada kebijakan yang harus ditetapkan (*policy research*).

Secara historis analisis statistik mempunyai kekurangan dalam mendasarkan metodologisnya untuk mempelajari sistem secara menyeluruh. Sebagai alasannya adalah inferensi statistik hanya memberikan pengaruh yang kecil dalam memprediksi atau menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, huru-hara, SARA, dan polusi. Hal ini karena tidak adanya metode pengkajian terhadap sistem total dimana komponen-komponennya tidak bisa dipisah-pisahkan. Suatu sistem yang kompleks tidak bisa disederhanakan menjadi jumlah dari setiap bagiannya. Metode yang bersifat reduksi, seperti linierisasi, permodelan yang statis dan pengurangan faktor, sangat tidak berkemampuan dalam menelaah sistem yang kompleks.

Berbagai teori kemudian dikembangkan untuk perencanaan dinamik, dimana informasi kualitatif mendominasi input kebijakan. Teori yang integratif dan interdisiplin ini banyak timbul dari Ilmu Sistem (*System Science*). Pada tahun 90-an, yang telah dikenal adalah teknik Analisa Jejaring Keputusan (AHP), *Total System Intervention* (TSI), *Soft System Methodology* (SSM), *Decision Matrix* (ECM dan MICMAC), *Viable System Models* (VSM) serta *Interpretative Structural Modelling* (ISM).

Berbagai teknik manajerial tersebut masih jarang dikuasai oleh para perencana dan peneliti di Indonesia, sehingga ada kecenderungan untuk mengabaikan aplikasinya. Alasan klasik yang selalu didengungkan adalah "terlalu teoritis" dan "sulit dimengerti". Maka kembalilah mereka dengan teori reduksi yang penuh kesesatan inferensi dan jebakan analisa.

Konsepsi Sistem Ekonomi Domestik ini disusun melalui alur pikir hipotesis yang didukung pembuktian empiris dari beberapa kajian lapang yang telah dan sedang dilakukan. Merujuk pada metode Sistem, maka ulasan tentang Sistem Ekonomi Domestik ditelaah pada empat strata pengambilan kebijakan (DSS) yaitu Strata Direktif, Strategis, Taktis dan Operasional. Pada tulisan ini hanya ditinjau di tiga strata, sedangkan tingkat Operasional memerlukan masukan rinci dan data aktual.

- **Strata Direktif**

Tanpa melakukan redefinisi, kata pokok ekonomi pada Sistem Ekonomi Domestik adalah salah satu dari empat sendi kehidupan bangsa disamping politik, budaya dan keamanan. Sedangkan kata sanding kerakyatan dipetik dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Apabila kedua kata tersebut disandingkan untuk pembangunan nasional, maka pengertiannya menurut menjadi: pembangunan dari, oleh dan untuk rakyat dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa, dengan senantiasa harus

merupakan perwujudan Wawasan Nusantara serta memperkuat Ketahanan Nasional.

Sesuai dengan *Soft System Methodologi* (SSM), maka setiap kajian sistem di strata direktif harus mampu menghasilkan buah pemikiran tentang misi sistem itu sendiri. Menetapkan misi memerlukan visi yang digali dari dasar dan falsafahnya. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan informasi, dalam telaah Sistem Ekonomi Domestik ini dapatlah kiranya visi diserap dari UUS 1945 pasal 27 yaitu: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari sini kita dapat menemukan misi Sistem Ekonomi Domestik yang pokok yaitu penyediaan lapangan pekerjaan, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga negara.

Lebih lanjut, apabila diterjemahkan dalam direktif kebijaksanaan pembangunan, maka Sistem Ekonomi Domestik mempunyai misi luhur untuk mengupayakan aspek perekonomian bangsa yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak (*common people*). Barangkali lebih pas menggunakan istilah rakyat banyak dari pada rakyat kecil yang seringkali dipersinggung dengan terminologi kaum protelar yang berbau "kiri". Selain itu, rakyat banyak yang mencerminkan nuansa positif dari kekuatan bukan hanya ketidakberdayaan.

Bagaimana juga, di Indonesia rakyat banyak umumnya mencakup kelompok berpenghasilan rendah dan belum bias menikmati hasil pembangunan setelah 64 tahun merdeka. Dengan kepemihakan kepada mereka, sudah jelas Sistem Ekonomi Domestik (SED) tidak boleh mengacu pada falsafah ekonomi yang ditelorkan oleh Adam Smith, yang pada tahun 1776, menyatakan: "*Without unequal distribution income, economic growth is not possible, for the whole of the yearly output will be consumed*".

Maka makin jelaslah arahan Sistem Ekonomi Domestik, bahwa turunan (derivasi) apapun dari falsafah tersebut diatas yang secara sadar merekayasa ketidakmerataan, harus direvisi. Karena bangunan Sistem Ekonomi Domestik berdiri dari pilar-pilar Pancasila, dimana Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah salah satu silanya.

- **Strata Strategis**

Kesalahan terbesar dalam proses perencanaan yang bersifat strategis adalah menerapkan langsung teknik Penelitian Operasional dan atau aplikasi statistik inferensi. Hal ini umumnya disebabkan kebiasaan yang sulit dirubah dari perencana jangka pendek yang konservatif atas keahlian yang dipunyai. Kebiasaan

tersebut dapat menjerumuskan proses perencanaan strategis menjadi rencana operasional jangka pendek tanpa arahan yang terprogram.

Sudah sering dikemukakan, apabila sekelompok perencana sedang mendiskusikan arahan strategis maka aktor yang vokal menjadi pengarah utama. Suatu contoh tentang program industrialisasi pertanian, bilamana pimpinan group seorang ahli teknik maka yang muncul adalah prioritas alat dan mesin pertanian. Apabila dia dari sosial budaya maka adat masyarakat yang terpenting dan bila dia adalah dari sosial ekonomi, maka kredit adalah fokus perhatian.

Bagi seorang pengambil keputusan yang dihadapkan dengan sejumlah pakar, maka yang terjadi adalah kebingungan karena argumentasi dan rasionalisasi masing-masing. Oleh karena itu, sebagai jalan pintas dia memilih "jago" (*champion*) dari group tersebut, kemudian dia ikut apa saja yang diarahkan oleh jagonya. Tentu saja kalau tepat, maka perencanaan menjadi efektif. Namun bila jago tersebut terpillih salah, maka berantakanlah program tersebut dan gagal untuk mencapai misi sebenarnya. Gejala ini sering menghantui para koordinator kebijakan strategis yang didukung oleh tim multi-disipliner dan lintas sektoral.

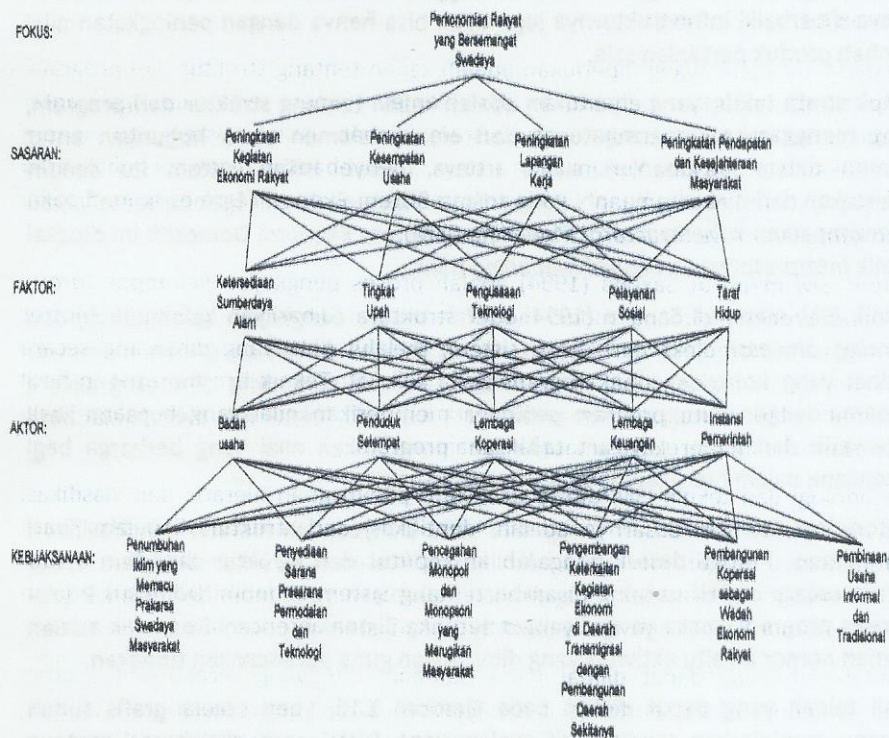
Salah satu metode sistem yang dapat digunakan untuk menelaah konsistensi dari suatu kebijakan strategis yang bersifat hirarkis adalah Analisa Jenjang Keputusan-AJK (*Analytical Hierarchy Process-AHP*). Metode yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty ini ditujukan untuk memodelkan perihal tak terstruktur, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun manajemen. Didalam penerapan AJK sedapat mungkin dihindarkan adanya penyederhanaan dengan pembuatan asumsi-asumsi agar diperoleh model yang representatif. Penerapan AJK membuka kesempatan adanya perbedaan pendapat dan konflik sebagaimana yang ada dalam kenyataan sehari-hari, dalam usaha mencapai konsensus.

Hasil penjenjangan dari SED tersebut dapat dilihat pada gambar 14. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan catatan, yaitu fokus ternyata Perekonomian Rakyat yang bersemangat swadaya, sehingga pengertian kemandirian sudah jelas perlu dicanangkan. Melalui masukan para ahli, dan diolah dengan Matrik Komparatif Berpasangan, maka kebijaksanaan publik yang mendapat nilai tinggi adalah:

- Penumbuhan iklim yang memacu prakarsa dan sumberdaya masyarakat
- Pembinaan Usaha Informal dan Tradisional
- Pencegahan Monopoli dan Monopsoni yang merugikan masyarakat

Dari segi aktor, yang paling ditekankan peranannya justru instansi pemerintah. Dengan demikian dalam Sistem Ekonomi Domestik, ternyata masih dibutuhkan

intervensi pemerintah, khususnya dalam penyediaan anggaran bagi Fasilitas Pembiayaan Darurat dan atau bantuan sosial pada saat dampak krisis melanda daerah-daerah miskin dan terbelakang. Selain itu pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pajak dalam stimulus fiskal untuk pemberdayaan UMKM dan mendorong ekspor.



Gambar 1.11. Kerangka Hirarki Sistem Ekonomi Domestik

• Strata Taktis

Sebelum sampai ke tingkat operasional, rencana strategis mestinya harus melalui jembatan strata taktis. Proses ini sering dilupakan sehingga banyak kerja operasional tidak mengacu pada rencana strategis, dan yang terjadi adalah kesemrawutan yang dikenal sebagai "plan as progress". Begitu banyak penyesuaian di lapangan sampai tidak bisa dipisahkan mana rencana, mana tindakan. Strata taktis umum diperlukan pada saat penyusunan program.

Suatu pemrograman, totalitas sistem (*whole system*) seperti ekonomi domestik, tidak bisa dibangun pada bagian-bagiannya, namun harus dimengerti sebagai keseluruhan. Apabila dilakukan perubahan, maka seluruh sistem harus dihadapi, apabila tidak maka hanya perubahan kecil dan tidak efektif yang terjadi. Sebagai misal, program pembangunan desa tertinggal tidak akan berkelanjutan, bilamana hanya diperbaiki infrastrukturnya juga tidak bisa hanya dengan peningkatan nilai tambah produk pertanian saja.

Untuk strata taktis, yang diperlukan adalah kajian tentang struktur dari program, yang menggambarkan pengaturan dari elemen-elemen serta hubungan antar elemen dalam membentuk suatu sistem. Sebab istilah sistem itu sendiri ditentukan dari dua kata Yunani yang artinya "menyebabkan tegak bersama", atau "menempatkan kebersamaan". Pada telaah Sistem Ekonomi Domestik ini dipakai teknik *Interpretative Structural Modelling* (ISM).

Teknik ISM menurut Saxena (1994) adalah proses pengkajian kelompok (*group learning process*) dimana model-model struktural dihasilkan kelompok memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Teknik ISM merupakan hasil sistematis dari suatu program sehingga memberikan nilai yang berharga bagi perencana dalam merencanakan tata laksana program.

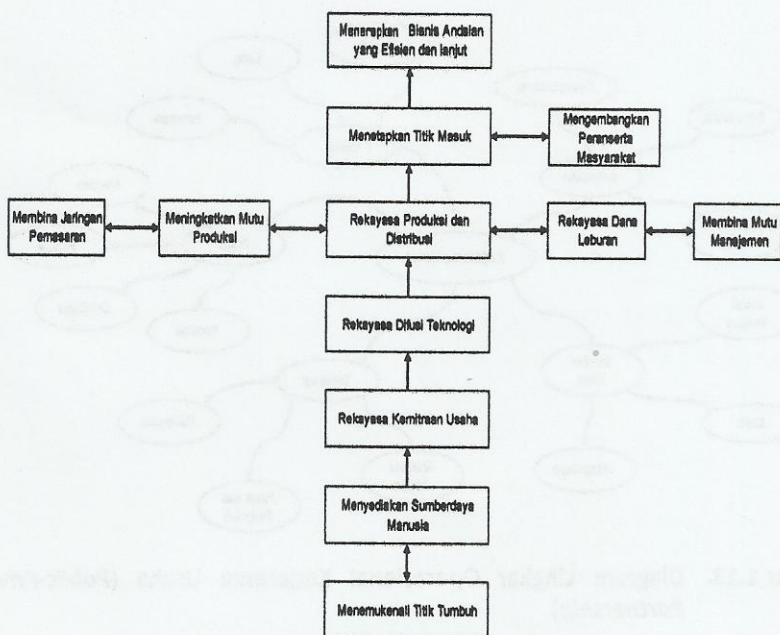
Metodologi dan teknik ISM dibagi dua yaitu penyusunan hierarki dan klasifikasi sub-elemen. Prinsip dasarnya adalah identifikasi dari struktur di dalam suatu sistem secara efektif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dari 9 sub-elemen program, maka yang disajikan tentang Sistem Ekonomi Domestik adalah elemen nomor 8 yaitu aktivitas yang dibutuhkan guna perencanaan tindakan.

Hasil telaah yang dapat dilihat pada Gambar 1.15, yang secara grafis sudah mampu menjelaskan sendiri (*self explanation*). Disini perlu dielaborasi tentang titik tumbuh (*growth point*), titik masuk (*entry point*) dan dana leburan (*blending financing*).

Taktik titik tumbuh berbeda dengan pola pusat pertumbuhan. Titik tumbuh berarti suatu unit kegiatan yang spesifik lokal, yang patut dikembangkan, dan pada gilirannya secara spiral mengimbas ke titik-titik lainnya. Taktik ini sangat efektif di pedesaan dan di daerah tertinggal, karena tidak membutuhkan dukungan infrastruktur terpusat (*growth center*) yang mahal. Pada beberapa temuan lapangan, titik tumbuh untuk program Sistem Ekonomi Domestik di daerah pedesaan yang ditemukan adalah agroindustri kecil dan usaha lepas panen, pariwisata alam, jasa bangunan dan perbengkelan, warung makanan dan toko serba ada, industri rumah tangga kerajinan hasil seni dan kebun bibit.

Karena sifatnya yang lokal, maka variasi titik tumbuh pasti banyak. Oleh karena itu sulit dilakukan generalisasi dan standarisasi. Titik masuk adalah proses "kulo-nuwun" yang mengacu pada sosio-budaya setempat. Hasil seminar yang disponsori World Bank (1992) merekomendasikan "used credit as an entry point to economic and social activities". Apabila kita rujuk kembali pada strata direktif, maka rekomendasi tersebut bisa dipertanyakan.

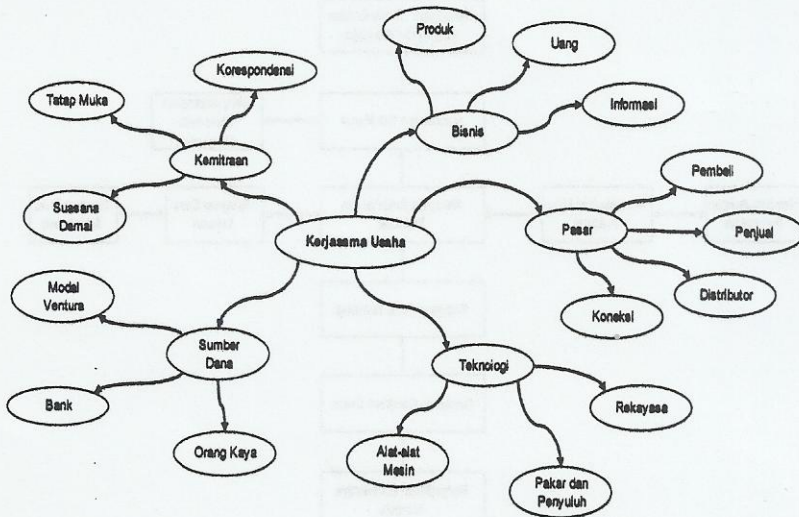
Hasil studi kasus pada pengembangan agroindustri hasil laut di Madura dan Jawa Timur, menyatakan bahwa titik masuk sebaiknya adalah bernilai kemasyarakatan misalnya perbaikan lingkungan hidup (penyediaan listrik, air bersih, MCK, dan tempat sampah), peribadatan (perbaikan mushola), dan santunan sosial (penyantunan anak yatim dan beasiswa). Inilah yang disebut pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*).



Gambar 1.12. Struktur Kegiatan Sistem Ekonomi Domestik

Motor penggerak Sistem Ekonomi Domestik pasti membutuhkan bahan bakar yaitu dana. Taktik yang berhasil, sebagaimana dijumpai pada pengembangan

agrobisnis hasil hortikultura di Jawa Barat, memerlukan dana leburan yaitu anggaran yang berasal dari berbagai sumber dengan masing-masing implikasinya. Sudah jelas Sistem Ekonomi Domestik tidak mungkin menggunakan dana sepenuhnya dari bank komersial, dan perlu masih tidak dianggap patut bila sumber dana semua bersifat hibah. Jadi untuk setiap program Sistem Ekonomi Domestik harus direkayasa dana leburan (blending financing) yang untuk itu secara simultan perlu dilakukan beberapa kegiatan seperti terlihat pada Gambar 1.13. Pada saat ini, sudah cukup banyak dana khusus yang bisa dileburkan seperti dana keuntungan BUMN, dana CSR, KUR, Modal Ventura, dan dana bergulir. Dipedesaan kegiatan ini dapat didukung oleh berbagai lembaga keuangan mikro dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).



Gambar 1.13. Diagram Lingkaran Operasional Kerjasama Usaha (Public-Private Partnership)

Lebih lanjut, yang tidak kalah pentingnya direkayasa adalah kemitraan usaha, yang wujud prakteknya adalah kerjasama usaha (public-private partnership). Proses perekayasaan tidak mudah dan makan waktu, oleh karena itu memerlukan dukungan instansi pemerintah untuk mempercepat. Kompleksitas proses kerjasama usaha ini dapat dijelaskan melalui Diagram Lingkaran (Causal Loop), yang

telah diratifikasi pada workshop inovasi oleh European Business Innovation Center di Brussel tahun 1991 (lihat Gambar 1.14). Dari diagram tersebut patut dicatat perbedaan lingkaran pasar dan lingkaran bisnis, serta perlunya suasana "damai" dalam membina kemitraan (*partnership*). Taktik seperti ini perlu dipahami sebelum mengoperasionalkan program menjadi aktivitas bisnis didalam rancangan kebijakan Sistem Ekonomi Domestik. Khusus pada lingkaran Pasar, diperlukan perhatian khusus dalam penjabaran strategi substansi impor, terutama pada komoditi pangan utama. Oleh karena itu, potensi komoditi lokal perlu dipetakan secara jelas dan prospektif.

Rancangan Kebijakan

Untuk para perencana pembangunan yang berkehendak menyusun kegiatan atas dasar program dan rencana strategis Sistem Ekonomi Domestik, harus mempunyai lima unsur pokok dalam manajemen perubahan yaitu visi, keterampilan, insentif, sumberdaya dan rencana tindakan. Gambar 1.15 mampu menjelaskan bilamana terjadi kesalahan diakhir proses perencanaan yang diketemukan adalah kebingungan, atau frustrasi. Yang jelas bila tidak dikuasai teknik manajerial yang tepat maka hasilnya adalah keresahan, yang ditandai dengan debat kusir berkepanjangan pada waktu presentasi hasil rencana.



Gambar 1.14. Faktor Perencanaan Dalam Mengelola Dinamika Perubahan Sistem

Ginandjar Kartasasmita (1996) berpendapat bahwa menghadapi ekonomi RI di abad 21, sebaiknya lebih memberi perhatian pada sektor-sektor riil, di bidang produksi dan distribusi, termasuk pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Dengan semikian pengejawantahan Sistem Ekonomi Domestik seyogyanya dirupakan dalam aktivitas produksi dan distribusi, terutama pada usaha skala mikro, informal dan tradisional.

Usaha mikro, apalagi yang gurem, pada umumnya berada pada status antara dari keadaan semrawut (*chaos*) sampai ke situasi yang berketeraturan (*orderly*). Hal ini dikarenakan disatu sisi sifat usaha mikro yang sangat tergantung pada kehendak dan kreasi sang pemilik, di lain pihak usaha ekonominya menuntut keteraturan sejalan dengan tata bisnis dan peraturan perundangannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode operasional khusus untuk diagnosa yang efektif sekaligus mampu merekayasa struktur dan fungsi dari pembangunan sistem yang berlaku pada perusahaan mikro dan kecil.

Seorang pakar bisa menjadi frustrasi, bilamana segala curahan pikiran dan energinya untuk memberdayakan berbagai usaha mikro menemui lingkaran setan. Mencari mitra pembeli, timbul masalah mutu dan kontinuitas. Pelatihan teknik produksi dilakukan, muncul kekurangan modal. Investasi dengan kredit murah diadakan, perlu kredibilitas, harus ada pasar dan harga yang wajar. Demikianlah terus berbelit dan makin ruwet, sehingga yang tidak berdaya justru pakar tersebut, dan ujung-ujungnya malah memperdaya.

Apabila belum bertemu dengan solusi yang memuaskan, maka kembali pada akar penyelesaian masalah dari usaha mikro yang jumlahnya lebih dari 42 juta unit dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Apakah asumsi dasar yang digunakan sudah benar? Apakah teori tersebut berlaku untuk usaha kecil? Keadaan stabil yang semu, seperti karakteristik perusahaan kecil, pada tingkat kritikalitas tertentu, setiap gejala sedikit saja dapat membuat perubahan yang besar. Oleh karena itu diperlukan upaya manajemen terhadap perubahan yang basisnya makroskopik, stokastik dan dinamik. Teori-teori manajemen klasik ternyata berkemampuan rendah dalam diagnosa perubahan yang ruwet dan sering lepas kendali.

Menghadapi kompleksitas manajemen perubahan tersebut, Ilmu Sistem sudah sering dipakai sebagai sumber metodologi untuk mengkaji perubahan pada beragam situasi permasalahan dari konteks keterpaduan upaya. Ilmu Sistem berpotensi tinggi untuk memperhitungkan sekaligus antara perubahan dan stabilitas yang dituntut Sistem Ekonomi Domestik. Kondisi ini diperlukan pada setiap intervensi di perusahaan kecil, sebab sering kali ditemukan kegiatan

pembinaan bisa menjadi pembinasaan. Begitu diintervensi, usaha mikro alih-alih jadi lebih maju, malah mati.

Hasil studi ini menyatakan sektor yang memiliki tingkat kritikalitas sangat penting saat sekarang adalah usaha mikro/sektor informal, kelautan dan perikanan rakyat, pangan dan gizi, usaha kecil/menengah, pertambangan besar, dan kehutanan. Untuk meningkatkan keberdayaan UMK, perlu dilakukan kebijakan peningkatan dalam perihal: (1) akses ke sumberdaya keuangan, (2) kualitas SDM dan upaya menghasilkan wirausaha baru, serta (3) Pengkajian dan pemetaan sektor-sektor usaha UMK potensial (Kolopaking 2009). Permasalahan yang ada selama ini adalah bahwa lebih banyak UMK yang unbankable daripada sebaliknya. UMK potensial sulit akses pada lembaga perbankan itu disebabkan karena berbagai hal terutama:

- **Legalitas Usaha**

Pengusaha UMK sering tidak memiliki kelengkapan dokumen yang diperlukan (SIUPP, NPWP, KTP, rekening listrik, dll) untuk mengurus permohonan kredit kepada lembaga pembiayaan, baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Tidak adanya dokumen ini dapat disebabkan karena tidak adanya pengetahuan tentang tata cara pengurusan dokumen tersebut, atau juga karena panjangnya rantai birokrasi dalam mengurus dokumen tersebut.

- **Administrasi Keuangan**

Pengelolaan UMK seringkali belum dilakukan secara profesional. Pembukuan atas hasil usaha belum menjadi sebuah kebutuhan bagi pengusaha kecil. Pertimbangannya, jumlah aset dan perputaran yang masih sedikit membuat pengusaha kecil beranggapan bahwa kegiatan administrasi/pencatatan belum menjadi kebutuhan mereka. Padahal melalui kegiatan ini, pengusaha dapat mengetahui pertumbuhan usaha mereka. Hal ini juga merupakan pertimbangan bagi pihak perbankan dalam menyalurkan kredit.

- **Konsistensi Volume dan Kualitas Produksi**

Pengelolaan yang belum terlaksana dengan baik juga mengakibatkan jumlah dan kualitas produksi usaha yang belum stabil. Hal ini tentunya menyulitkan bagi pihak perbankan untuk menaksir pendapatan dan pemasukan usaha yang bersangkutan di masa yang akan datang.

- **Kontinuitas Pemasaran**

Konsekuensi dari poin di atas adalah, keberlanjutan pemasaran menjadi tidak dapat diprediksi. Hubungan kemitraan dagang dengan pihak lain pada saat ini

lebih mudah dilakukan atas dasar kepastian dan keteraturan transaksi. Hal itu mensyaratkan adanya kemampuan pembelian dan penjualan yang teratur dan berkala. Ketidakmampuan akan pemenuhan hal ini akan menyulitkan pihak perbankan dan lembaga pembiayaan dalam mengucurkan pinjaman.

- **Kelangsungan Usaha**

Jumlah pemilik yang relatif sedikit (bahkan seringkali tunggal) dalam UMK menyebabkan perkembangan usaha ini sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan pribadi pemilik usaha tersebut. Hal itu sebetulnya sangat mudah dipahami, karena pada dasarnya orang menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Hanya saja, tanpa adanya pihak lain dalam usaha membuat segala keputusan yang ada terkait usaha tersebut menjadi dapat diputuskan oleh individu hanya berdasar kebutuhan pribadi semata. Di mata pihak perbankan, hal ini menjadikan kelangsungan usaha UMK relatif lebih sulit untuk diprediksi.

- **Penjaminan Kredit**

Kesulitan dalam menyediakan jaminan kredit merupakan permasalahan klasik ketika seorang pengusaha kecil hendak mengajukan pinjaman. Asset yang paling sering digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman oleh seorang pengusaha adalah tanah. Padahal, pengurusan dokumen tanah di Indonesia, dengan birokrasi yang ada sekarang, memerlukan waktu yang kadang-kadang mencapai hitungan tahun.

Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan yang melayani usaha mikro sering disebut sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) adalah kelembagaan yang sudah lama dikembangkan di Indonesia. LKM sebagai lembaga penyedia jasa-jasa keuangan kepada nasabah berpenghasilan rendah yang meliputi pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani, penjual jasa dan produsen kecil. Bank Pembangunan Asia mendefinisikan LKM sebagai penyedia jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, pengiriman uang, asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah (ADB, 2000). Istilah lembaga keuangan mikro merujuk pada jasa-jasa keuangan berskala kecil terutama kredit dan simpanan yang disediakan untuk petani, nelayan, peternak; atau yang memiliki usaha kecil/mikro yang memproduksi, mendaur ulang, memperbaiki atau menjual barang; yang menjual jasa; yang bekerja untuk mendapat upah dan komisi; yang memperoleh

penghasilan dari menyewakan tanah, kendaraan, hewan atau mesin dan peralatan dalam jumlah kecil.

Di Indonesia, LKM telah lahir sejak era tahun 1970-an dengan berbagai program dan skim. Perlu diakui, LKM juga telah berperan penting dalam menyediakan jasa keuangan bagi pelaku UMK. Hasil penelitian GTZ mengemukakan bahwa ada 6.123 unit BRI Unit Desa dan BPR yang melayani hampir 28 juta nasabah berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Juga ada sekitar 7.617 lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan lain-lain yang melayani sekitar 2.084.000 nasabah dan 6.495 koperasi yang melayani 6,1 juta anggotanya. Tidak kurang dari 51 juta klien atau hampir seperempat penduduk Indonesia berhasil dilayani oleh LKM pada akhir tahun 1990an. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain pencapaian LKM di Indonesia masih perlu dioptimalkan.

Demikian juga diketahui bahwa LKM di Korea Selatan pada masa awal pembangunan negara ini memainkan peranan penting. Demikian juga di Taiwan bahwa LKM telah berperan dalam pembiayaan UKM yang menyumbang sekitar 50% pendapatan nasional dan memperkerjakan 62 % dari total tenaga kerja Taiwan. Kondisi serupa juga dapat ditemukan di Thailand dimana hampir 70% dari mereka yang aktif dalam pasar kredit pedesaan memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro informal.

Kehadiran LKM dibutuhkan paling tidak karena dua hal. *Pertama*, sebagai salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kemiskinan. Masyarakat miskin pada umumnya mempunyai usaha skala mikro. Terminologi World Bank, mereka disebut sebagai *economically active poor* atau pengusaha mikro. Dalam konfigurasi perekonomian Indonesia, lebih dari 90% unit usaha merupakan usaha skala mikro. Mengembangkan usaha skala mikro merupakan langkah strategis karena akan mewujudkan *broad bases development* atau *development through equity*. Mereka membutuhkan permodalan guna mengembangkan kapasitas usahanya. Dengan usaha yang meningkat (menjadi usaha skala kecil), secara efektif akan mengatasi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam kategori fakir miskin. Pada sisi lain, skim keuangan mikro sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kedua, LKM dibutuhkan karena menjadi salah satu instrumen pengembangan pasar keuangan mikro. Secara pragmatis, pasar keuangan mikro merupakan aspek keuangan dari semua proses ekonomi di segmen mikro yang meliputi segala sesuatu yang menyangkut tabungan dan kredit usaha. Pada pemahaman ini

dicantumkan kata *tabungan* dan *kredit*, guna menghindarkan pemahaman sempit seolah-olah di segmen mikro pelaku-pelaku usahanya hanya membutuhkan kredit, melupakan bahwa mereka mempunyai potensi menabung, dan/atau dapat diberdayakan mempunyai kemampuan menabung. Pendek kata, pada pasar keuangan mikro terdapat potensi besar dalam hal *penawaran* (tabungan) dan *permintaan* (kredit).

Di Indonesia, LKM dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, *formal*, *semi formal* dan *non-formal*. LKM *formal* merupakan LKM yang keberadaannya telah mempunyai payung hukum Undang-undang. Termasuk LKM ini, adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, serta Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, berdasarkan Undang-undang Nomor 25, tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pengembangan LKM untuk masyarakat menekankan pada lembaga yang berperan utama sebagai penyedia pinjaman, di mana sumber pembiayaan dari modal baik oleh masyarakat maupun sumber-sumber finansial lain yang ditujukan untuk masyarakat terus diusahakan, sehingga tersedia dana yang cukup besar sebagai modal bagi masyarakat.

Pembentukan LKM dalam masyarakat, mendasarkan diri pada kelembagaan lokal yang sudah ada, baik formal, semi formal dan non formal. LKM formal yang terkait akan diuntungkan dengan meningkatnya jangkauan dan jumlah nasabah, sementara masyarakat akan mendapatkan akses dukungan keuangan untuk modal.

Sementara itu fungsionalisasi LKM oleh masyarakat menekankan kepada mobilisasi dana tabungan berdasarkan kemampuan masyarakat sendiri sebagai sumber finansial. Pelayanan keuangan biasanya diperuntukan kepada anggota. Dimana pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat serta semangat kewirausahaan mendapatkan penekanan.

Impikasi Kebijakan

Dapat disimpulkan bahwa perwujudan Sistem Ekonomi Domestik adalah mutlak perlu, sebagai bukti nyata amanat penderitaan rakyat tetap menjiwal kiprah pembangunan nasional. Wujud nyata tersebut dicirikan pada kepemilikan yang proporsional pada golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu penguatan (*strengthening*) usaha mikro dan kecil, khususnya melalui lembaga keuangan mikro

di wilayah pedesaan, harus menjadi prioritas dan terus berlanjut dengan segala konsekuensinya. Sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara maksimal harus mendapat perhatian intensif, dalam hal ini tentu saja sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sebagainya mendapat prioritas.

Untuk membantu pemahaman mengenai arti yang terkandung dalam ekonomi rakyat secara sederhana dapat memberikan beberapa ciri yang melekat dalam pengertian ekonomi rakyat; apakah itu pertanian rakyat, pertambangan rakyat, industri rakyat, peikanan rakyat dan lain sebagainya. Ciri-ciri dimaksud diantaranya yaitu: (1) Jumlah partisipan atau pelakunya banyak, (2) Skala produksi kecil, (3) Teknologi yang digunakan sederhana, (4) Standar kualitas rendah, (5) Jangkauan pasar sangat terbatas, (6) Posisi tawar menawar lemah, (7) Keterampilan manajerial sangat sederhana dan (8) Sebagian besar masuk kedalam kategori sektor informal.

Penyebab kenapa pelaku ekonomi rakyat tidak banyak mengalami perkembangan dari generasi ke generasi tidak lain disebabkan oleh 2 hal faktor utama, (1) faktor internal sendiri, yaitu sebagai faktor intern yang menyebabkan kenapa Mereka tidak dapat memanfaatkan peluang positif akibat perubahan dengan cepat, seperti skala ekonomi, kemampuan manajerial, penggunaan teknologi yang serba terbatas, (2) faktor yang bersifat eksternal, yang berbagai perkembangan diluar jangkauan para pelaku ekonomi rakyat yang membuat mereka semakin tidak berdaya seperti persaingan yang semakin tajam dengan pelaku-pelaku yang lebih kuat/besar, serta berbagai aturan "menyudutkan" keberadaan pelaku ekonomi rakyat seperti pengaturan tata niaga dan lainnya.

Inti dari Sistem Ekonomi Domestik, adalah bahwa seluruh tatanan, dan kegiatan perekonomian adalah "dari, oleh, dan untuk rakyat". Didalam pengertian tersebut terkandung bahwa kepentingan ekonomi masyarakat (rakyat) haruslah menjadi acuan kebijakan dari kegiatan dari perekonomian nasional. Dalam kehidupan perekonomian dimana sebagian besar pelakunya adalah "ekonomi rakyat" maka sudah pada tempatnya pula jika rakyat mendapat kedudukan yang layak, dalam arti rakyat menjadi penyelenggaraan atau peserta dalam sistem, susunan, dan kegiatan perekonomian nasional. Hanya dengan demikian maka kemakmuran dan kesejahteraan sosial sebagai pengejawantahan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia akan menjadi kenyataan.

Di tengah-tengah globalisasi yang terjadi dengan tempo yang sangat cepat dan intensitas yang semakin tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional, maka keberadaan Sistem Ekonomi Domestik menjadi suatu tanda tanya besar. Akankah mereka menjadi "tergilas" dengan roda mekanisme pasar dunia yang

semakin menuntut pelaku-pelaku ekonomi yang dapat dengan cepat mengikuti berbagai perubahan yang terjadi?. Bagaimana pula dampak sosial-politik yang diakibatkan dengan semakin tersisihnya pelaku ekonomi rakyat itu?. Proses penyesuaian yang bagaimana yang harus disiapkan agar "biaya" sosial-politik yang ditimbulkannya masih dalam batas-batas aman. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu pada dasarnya menunjukkan betapa perhatian yang serius (keberpihakan) harus dicurahkan lebih banyak lagi kepada berjuta-juta pelaku ekonomi yang tidak berdaya itu. Jawaban yang tepat adalah pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*).

Dalam peran situasi krisis bertaraf nasional, peran pemerintah yang bersih dan berwibawa menjadi sangat penting. Apalagi dalam menangani krisis di sektor keuangan, bilaman diperlukan pemanfaatan dana pemerintah maka prinsip kehati-hatian dalam pengambilan kebijaksanaan (*discretionary power*) adalah penjamin keberhasilan program *anti-chaos*. Prinsip "*good governance*" terutama difokuskan pada pemilihan sasaran (*targeting*) maupun mekanisme penyampaian (*delivery mechanism*) daripada dana pemulihan krisis. Kebocoran dan kecerobohan harus dihindari, niat baik saja tidak cukup.

Pengalaman pahit yang perlu dijadikan pelajaran, adalah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sewaktu Krismon 1997/98. Audit investigasi BPK pada 21 Juli 2000 menyimpulkan dari total BLBI yang disalurkan ke 48 bank sebesar Rp. 144.54 triliun, terdapat potensi kerugian Negara 95.78%. Potensi kerugian didasarkan atas temuan penyimpangan dalam ketentuan, kelemahan sistem dan kelalaian. Sedangkan hasil investigasi BPKP menyatakan adanya penyimpangan dana BLBI sebesar 58.78%. Menurut Djony Edward (2010), diperlukan penyelesaian kasus BLBI yang didalamnya ditengarai ada unsur tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan.

Pelajaran anti-chaos lain yang patut dicermati adalah kasus *bail out* bank Century sebesar Rp. 6.7 triliun yang dikaitkan dengan situasi krisis finansial global. Kebijakan penggelontoran dana Fasilitas Pembiayaan Darurat dengan merujuk pada Perpu JPSK (Jaring Pengaman Sektor Keuangan) pada bulan Nopember 2008, telah mengundang perdebatan berkepanjangan. Dan akhirnya, DPR pada tanggal 3 Maret 2010 memutuskan kebijakan *bail out* tersebut bermasalah melalui hasil voting 325-212. Pada saat buku ini diterbitkan di April 2010, persoalan bank Century sedang dalam tahap penyelesaian di ranah hukum. Ke depan, diperlukan Crisis Management Protocol (CMP) sebagai payung hukum bilamana dibutuhkan tindakan darurat pada situasi yang gawat. Dengan demikian, antara kebijakan strategis dan kebijaksanaan operasional dapat terhubungkan legalisasinya.

Penutup

Tulisan ini dilakukan melalui kajian ilmiah tanpa pretensi untuk membahas arahan strategis pembangunan ekonomi bangsa dan tidak bermaksud terjebak dalam perdebatan yang kurang bermanfaat tentang berbagai terminologi perekonomian. Akan tetapi, naskah ini lebih mengedepankan pembahasan upaya penanganan dampak krisis global '08 dengan tetap memperhatikan arahan strategis sebagai visi jangka panjangnya. Oleh karena itu, tim perumus dari Working Group CMP FARD - IPB cenderung menggunakan istilah *normalisasi* daripada jargon *stabilisasi*. Dengan menitikberatkan upaya *normalisasi* maka berarti karakteristik keadaan "normal" adalah tujuan akhir dari suatu proses Krisis Manajemen Protokol.

Kesejahteraan rakyat sebagai tolok ukur keberhasilan Sistem Ekonomi Domestik harus meningkat, ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatnya pendapatan per kapita, menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pembangunan sistem ekonomi yang berkualitas ditandai dengan berkembangnya sistem jaminan sosial, tingkat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak, serta terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Upaya pemerataan akan menurunkan kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah melalui dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa, serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.

Daya adaptasi dan daya tahan perekonomian lokal meningkat melalui penguatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, sejalan dengan penguatan pembangunan pedesaan dan pelestarian sumberdaya alam sesuai dengan potensi daerah secara terpadu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta percepatan pembangunan infrastruktur dan SDM memerlukan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian domestik (*community based*).

Dalam rangka pencapaian tujuan Sistem Ekonomi Domestik, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan timbulnya proses rehabilitasi dan konservasi di daerah tertinggal dan terpencil. Keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam daerah dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya tahan (*resiliensi*) bangsa,

serta modal pembangunan pada masa yang akan datang. Kapasitas antisipatif serta penanggulangan dampak krisis perlu diteliti lebih lanjut di setiap tingkatan pemerintah daerah, dikaitkan dengan terlaksananya pembangunan di daerah yang didukung oleh semua sektor.

Referensi

- Bank Indonesia. 1998. *Financial Crisis In Indonesia*. BI, Jakarta.
- Carney, T.P. 2006. *The Big Ripp-of: How Big Business and Big Government Steal Your Money*. John Wiley and Sons, Inc., N. Jersey.
- Cooper, G. 2008. *The Origin of Financial Crisis*. Harriman House Ltd, UK.
- Djony Edward. 2010. *BLBI Extraordinary Crime: Satu Analisis Historis dan Kebijakan*. Penerbit LKIS, Yogyakarta.
- Eriyatno. 1996. *Sistem Ekonomi Kerakyatan*. Majalah Perencanaan Pembangunan No.4.
- Harvey, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism* Oxford University Press.
- Haseler, S. 2000. *The Super Rich: The Unjust New World of Global Capitalism*. Mc Millan Press Ltd, London.
- Hirshleifer, J. 2001. *Economic Foundation of Conflict Theory*. Cambridge University Press., USA.
- Huevel, Katrina (ed). 2009. *Meltdown: How Greed Corruption Shattered Our Financial System*. Nation Book Pub, NY.
- Howard., M.C and J.E King. 2008. *The Rise of Neoliberalism in advance Capitalist Economic*. Palgrave and Mc. Millan Pub., UK.
- Kotler, P and J. A. Caslione. 2009. *Chaotics: The business of managing and marketing in the age of turbulence*. Amacom Pub., N. York.
- Kwik Klan Gie. 2002. *Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa*. Makalah, Peringatan 100 tahun Bung Hatta.
- Midgky, G. 2000. *Systemic Intervention: Philosophy, Methodology and Practices*. Kluwer Academic Pub, London.
- Morrisc. R. 2009. *The Two Trillion Dollar Meltdown*. Black Pub. Inc, Australia
- Mubyarto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Mulej, M and D. Mocnik. 2009. *Are Market Requisite Holistic and Hence Efficient Institutions of Exchange?* University of Maribor, FEB, Slovenia.
- Prasentyoko, A. 2009. *Krisis Finansial: dalam Perangkat Ekonomi Neoliberal*. Penerbit Buku Kompas.
- Public Policy Analyst-Network. 2004. *Sistem Renovasi Perekonomian Nasional*. Naskah Akademik (tidak dipublikasikan).
- Sri Edi Swasono. 2010. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Perkumpulan Prakarsa.
- Yang Jian Mei. 2010. *An Approach Applying Soft System Methodology to Problem Situation of Interest Conflicts*. *System Research and Behavioral Science*. (27),2,171:190.